

LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN KEBERADAAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU



TIM PENELITI :

Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si (Ketua)

Anggota :

Ahmad Rifani, SE, MM

Dra. Isnawati, MM

M. Rusmin Nuryadin, SE, M.Si

Doni Setiadi, SSi, M.Si

M. Aksan Rahmatullah, SE, ME

Kerjasama :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
BANJARBARU

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

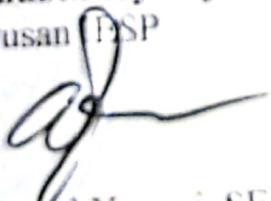
2016

HALAMAN PENGESAHAN

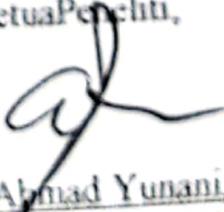
1. Judul Penelitian
Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru
2. Peneliti
 - a. Nama Lengkap : DR. H. Ahmad Yunani, SE, M Si
 - b. NIP : 197302071999031003
 - c. Pangkat/Ruang : Pembina/IV A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Unit Kerja : Fakultas EkonomidanBisnis
UniversitasLambungMangkurat
- Anggota
 - a. Ahmad Rifani, SE, MM
 - b. Dra Isnawati, MM
 - c. M RusminNuryadin, SE, M Si
 - d. DoniSetiadi, SSi, M.Si
 - e. M. AksanRahmatullah, SE, ME
3. Lokasi Penelitian : Kota BanjarbaruProvinsi Kalimantan Selatan
4. JangkaWaktuPenelitian : 3 Bulan
5. Sumber Dana : APBD Kabupaten HST
6. Besarnya Dana : Rp. 75.000.000,- (TujuhPuluh Lima Juta Rupiah)

Banjarmasin, September 2016

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Jurusan PSP


DR. H. Ahmad Yunani, SE, M. Si
NIP. 197302071999031003

KetuaPeneliti,


DR. H. Ahmad Yunani, SE, M. Si
NIP. 197302071999031003

Mengetahui/Menyetujui
Ketua LPPM
Universitas Lambung Mangkurat


DR. H.M. Rizki Firdaus, SE, MM
NIP. 197302071999031001

Mengetahui/Menyetujui


Prof. DR. Ir. H.M. Arief Soendjoto, M.Sc
NIP. 196712311995121002



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 245 /KUM/2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENELITIAN
KAJIAN KEBERADAAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penelitian Kajian Keberadaan Pasar Lokal di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Banjarbaru perlu penunjukan Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 25);

12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 45);

Memperhatikan : Nota Kerjasama antara Bappeda Kota Banjarbaru dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Nomor 070/306-LITBANGSTAT/Bapp dan Nomor 038/UN.8.2/PL/2016 tanggal 3 Pebruari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penunjukan Tim Penelitian Kajian Keberadaan Pasar Lokal di Tengah Petumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

- a. tim perencana mempunyai tugas :
 - 1) bertanggung jawab dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) memberi dukungan percepatan penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan.
- b. tim pelaksana mempunyai tugas :
 - 1) melakukan kaji ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
 - 3) serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan kelitbangan secara berkala Kepala Bappeda Kota Banjarbaru,cq.Kabid Litbang dan Statistik.
- c. tim pengawas mempunyai tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.

KETIGA : Lokasi Penelitian dilaksanakan di Wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan penelitian selama 60 (enam puluh) hari kalender.

KEEMPAT : Tim Perencana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honor dan Tim Pelaksana diberikan honor selama 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran satuan honor tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Mei 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
5. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/245/KUM/2016
 Tanggal : 25 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENELITIAN
 KAJIAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT PERBELANJAAN
 DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU

NO	NAMA PENELITI	JABATAN	Jumlah	Volume (Kegiatan)	Satuan Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Prof.Dr.Ir.H.M.Arief Soendjoto,M.Sc	Koordinator Penelitian	-	-	-
2.	Dr.Ahmad Yunani,SE,M.Si	Peneliti Utama/Ketua	1	240 jam	50.000
3.	M.Rusmin Nuryadi,SE,M.Si	Peneliti	1	240 jam	40.000
4.	M.Rifani,SE,MM.Ak	Peneliti	1	240 jam	40.000
5.	Isnawati,SE,MM,Ak	Peneliti	1	240 jam	40.000
6.	Hj.Rina Khairina,S.Sos,M.AP	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
7.	Hairina Yulianti,S.Sos	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
8.	Helfizah Ristiaty,SE	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
9.	Annisa C.Nurfaulin,S.I.Kom	Pembantu Peneliti	1	120 jam	25.000
10.	Dina Mariana,SE	Tenaga Administrasi	1	3 bulan	750.000
11.	M.Akhsan Rakhmatullah,SE,ME	Operator Komputer	1	3 bulan	600.000
12.	Doni Setiadi,S.Si	Pengolah Data	1	kegiatan	1.540.000



LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN KEBERADAAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU



TIM PENELITIAN :

Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si (Ketua)

Anggota :

Ahmad Rifani, SE, MM

Dra. Isnawati, MM

M. Rusmin Nuryadin, SE, M.Si

Doni Setiadi, SSi, M.Si

M. Aksan Rahmatullah, SE, ME

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada mulanya manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencari barang yang dibutuhkan. Karena tidak semua barang yang dibutuhkan didapatkan dengan mudah, maka manusia menukar barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang dibutuhkan. Sistem ini disebut dengan barter. Kegiatan barter adalah awal mula adanya kegiatan ekonomi. Berdagang merupakan kegiatan ekonomi yang mempertemukan pedagang atau penjual dengan pembeli.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau lebih jelasnya, daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.¹ Sedangkan menurut Philip Kotler, pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar adalah sebuah tempat yang terdiri atas sekelompok orang yang menawarkan barang dan sekelompok orang yang membutuhkan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum masyarakat mengenal dua jenis pasar, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Keduanya memiliki ciri yang berbeda jika dilihat dari bangunan, tempat tempat berjualan, dan sistem jual beli yang dilakukan. Pasar tradisional umumnya terdiri dari los atau tenda, tidak permanen, dan lingkungannya tidak nyaman karena becek, kotor, bau, dan tidak aman. Sedangkan pasar modern biasanya memiliki bangunan yang megah dan permanen, fasilitas memadai, nyaman, aman, banyaknya diskon yang ditawarkan, dan harga yang tercantum pasti.³

Pasar modern ada beberapa macam, diantaranya Minimarket, Pasar Swalayan, Supermarket, Hypermarket, dan Carrefour.⁴ Sedangkan pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.⁵ Keberadaan pasar tradisional merupakan bentuk nyata adanya kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah pasar lokal juga mengalami peningkatan karena meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Setiap penjual atau pemilik usaha berupaya untuk meningkatkan kualitas dagangannya sehingga dapat meningkatkan minat pembeli. Termasuk dengan menggunakan teknologi.

Secara umum pasar tradisional yang dalam hal ini adalah toko dan kios masih menggunakan alat hitung sederhana dan sistem pembayaran tunai. Berbeda dengan pasar-pasar modern yang telah menggunakan sistem pembayaran komputerisasi sehingga memudahkan penjual atau kasir dalam menghitung barang pembelian. Selain dengan alat hitung modern, sistem pembayaran di pasar atau toko modern juga beragam, tidak hanya bayar tunai, tetapi juga dapat menggunakan kartu kredit dari berbagai bank. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi para pembeli di pasar atau toko modern. Berbagai kemudahan dan penawaran menarik dari pasar modern membuat banyak pilihan bagi para pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak jarang mereka akan lebih memilih untuk belanja di pasar modern yang lengkap karena mereka dapat dengan mudah menemukan barang yang mereka cari dalam satu tempat. Keadaan tersebut tentu akan memberikan dampak bagi para pemilik toko atau kios. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sebaran dan penataan pasar lokal, pusat perbelanjaan modern, dan toko modern di Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana dampak pasar modern terhadap pendapatan daerah Kota Banjarbaru?
3. Bagaimana pengaruh pasar modern terhadap omzet penjualan, keuntungan usaha, dan jumlah penjualan barang pedagang tradisional di Kota Banjarbaru?

1.3.. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru adalah :

1. Untuk memetakan pasar lokal, pusat perbelanjaan modern, dan toko modern di Kota Banjarbaru;
2. Untuk menganalisis dampak pasar modern terhadap pendapatan daerah Kota Banjarbaru.
3. Untuk menganalisis pengaruh pasar modern terhadap omzet penjualan, keuntungan usaha, dan jumlah penjualan barang pedagang tradisional di Kota Banjarbaru.

Manfaat penyusunan Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru adalah untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Walikota Banjarbaru dalam mengelola pasar modern di tengah keberadaan pasar lokal di Kota Banjarbaru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional harus mencakup seluruh aspek kehidupan, diselenggarakan bersama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Dampak positif dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan tempat aktivitas ekonomi masyarakat yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang penataan Dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang dimaksud Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan (1) pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, (2) pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, dan (3) toko modern adalah toko dengan sistem

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Selanjutnya menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut batas luas lantai toko modern, yang dinamakan (a) *minimarket* jika luas lantai kurang dari 400 m², (b) *supermarket* jika luas lantai antara 400 m² sampai dengan 5.000 m², (c) *hypermarket* jika luas lantainya lebih dari 5.000 m², (d) *department store* jika luas lantainya lebih 400 m², dan (e) perkulakan jika luas lantainya lebih 5.000 m².

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah (a) *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya, (b) *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsomen, dan (c) perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pendapatan per kapita masyarakatnya terus naik yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang rendah, keadaan seperti ini menarik para investor untuk menanamkan modalnya ke daerah ini. Para investor yang bergerak di sektor perdagangan telah banyak membangun pasar modern didaerah ini. Pasar modern ini dikawatirkan akan menjadi persaingan yang tidak sehat dengan pasar tradisional yang selanjutnya akan terjadi gesekan yang mengganggu keamanan. Para konsumen akan mengalihkan belanjanya pada pasar modern yang biasanya bersih dan nyaman jika dibanding dengan pasar tradisional yang selalu kotor dan penuh ketidaknyamanan dalam berbelanja.

Para pedagang yang berjualan dipasar tradisional adalah para pengusaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan jumlah pengusaha terbesar yang dapat menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu bukti ketidaknyamanan berdagang dipasar yang telah disiapkan pemerintah adalah menjamurnya “ pasar tungging” hampir seluruh pelosok Kalimantan Selatan. Padahal jika pasar tradisional yang dibangun pemerintah dikelola dan dibina dengan baik maka para pedagang pasar tungging tersebut akan masuk berdagang ke dalam pasar tersebut dan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/ kota setempat.

Pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah banyak masuk di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti contoh di Banjarmasin belum jelas apakah pendiriannya tersebut sudah sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru. Begitu pula pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di kabupaten/ kota lainnya. Jika belum sesuai maka akan merusak tata ruang dan lingkungan.

Perlindungan merupakan segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha. Sedangkan pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/ tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern. Dalam rangka penertiban maka diperlukan penataan. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

Untuk membina diperlukan upaya kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru adalah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru menggunakan metode observasi langsung guna mendapatkan data primer, wawancara, serta mengumpulkan data sekunder melalui literature-literatur terkait.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasar lokal dan pasar modern yang sudah ada di Kota Banjarbaru dengan metode sampling menggunakan metode sensus yaitu mengambil sampel semua objek penelitian sebagai responden/sampling.

3.4. Definisi Operasional

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
2. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
3. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar - menawar.
4. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau

Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

5. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
8. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya
9. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
10. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
11. Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.
12. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.

13. Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
14. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
16. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai maeam barang kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran
17. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan eara pelayanan mandiri (swalayan)
18. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
19. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
20. Pusat perdagangan (trade centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
21. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

22. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat .

3.5. Tehnik Analisis

Tehnis analisis penelitian adalah statistik deskriptif dengan menggambarkan hasil pengolahan data statistik sederhana yang ditampilkan melalui hasil tabulasi silang.

3.6. Tim Peneliti

Susunan tim peneliti dalam kajian ini adalah :

Ketua : Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si (Ketua)

Anggota :

1. Ahmad Rifani, SE, MM
2. Dra. Isnawati, MM
3. M. Rusmin Nuryadin, SE, M.Si
4. Doni Setiadi, SSi, M.Si
5. M. Aksan Rahmatullah, SE, ME

3.7. Pembiayaan

Biaya kegiatan Kajian Keberadaan Pasar Lokal Di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Banjarbaru tahun 2016 pada Program Pengembangan dan Penelitian, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Bidang Penelitian Pengembangan, dan Statistik Bappeda Kota Banjarbaru.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH

4.1. KONDISI WILAYAH

A. KONDISI FISIOGRAFI DAN TOPOGRAFI WILAYAH

Kota Banjarbaru terletak antara 3025'40" sampai dengan 3028'37" Lintang Selatan dan 114041'22" sampai dengan 114054'25" Bujur Timur. Wilayah ini dibagi menjadi 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a). **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
- b). **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
- c). **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- d). **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Luas wilayah Kota Banjarbaru 371,3 km² dengan ketinggian berada pada 0-500 m dari permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru memiliki kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen luas wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen luas wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman < 30cm, 30-60cm, 60-90cm dan > 90cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90cm, dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kota Banjarbaru memiliki iklim tropis berkisar antara 23,3°C-32,7°C, suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada pada bulan Oktober (35,3°C) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Agustus (20,8°C). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 47% sampai dengan 98%. Selama 5 tahun terakhir,

curah hujan pada tahun 2010 merupakan curah hujan tertinggi. Curah hujan kota Banjarbaru di tahun 2014 cukup ekstrim. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 tercatat 173,3 mm dengan jumlah yang terendah terjadi pada bulan September (5 mm) dan tertinggi terjadi pada bulan Januari (443 mm).

B. PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan disuatu wilayah dan juga nasional. Jumlah penduduk yang banyak dapat bernilai positif juga negatif tergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengelola penduduk untuk meningkatkan kualitasnya baik dari segi pendidikan maupun derajat kesehatan.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2014 hasil proyeksi berjumlah 227.500 jiwa yang terdiri dari 116.730 laki-laki dan 110.770 perempuan atau dengan *sex ratio* 105 yang berarti jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Landasan Ulin yaitu sebanyak 58.749 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk 32.075 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kota Banjarbaru bervariasi antar kecamatan. Dengan luas wilayah sebesar 371,38 km², maka kepadatan penduduk Kota Banjarbaru per km² adalah 613 penduduk. Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 2.200 jiwa/km². Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Cempaka 219 jiwa per km².

Berdasarkan struktur penduduk, Kota Banjarbaru dapat dikatakan cukup ideal, hal ini ditunjukkan piramida penduduk dimana sebagian besar penduduk Kota Banjarbaru berusia antara 15–64 Tahun. Dimana kelompok usia ini adalah mereka yang terlibat aktif dalam lapangan

pekerjaan. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kota Banjarbaru sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sehingga diharapkan bisa menjadi penggerak roda perekonomian, bukan malah sebaliknya menjadi beban pembangunan. Angka ketergantungan penduduk Kota Banjarbaru sebesar 45,04%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 45 orang penduduk usia tidak produktif.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Banjarbaru, meningkat pula jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Kurun waktu tahun 2011-2014 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan namun serapan terhadap tenaga kerja justru mengalami fluktuatif (terjadi penurunan pada 2011 meningkat lagi pada 2012 dan menurun kembali pada 2014). Perkembangan ketenagakerjaan Kota Banjarbaru periode tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel.
Perkembangan ketenagakerjaan Kota Banjarbaru
periode Tahun 2011-2014

No	Indikator	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	TPAK (%)	67,06	61,57	60,94	60,18
2	Tingkat Pengangguran (%)	6,69	8,56	2,85	5,35
3	Bekerja (%)	93,31	91,44	97,35	94,65
4	Bekerja di sektor Primer	14,88	12,22	12,60	14,30
5	Bekerja di sektor Sekunder	29,00	23,50	29,39	17,65
6	Bekerja di sektor Tersier	56,12	64,29	62,01	68,05

Sumber: Sakernas 2011-2014

Pada tabel diatas tampak bahwa tingkat pengangguran berkurang selama tahun 2011-2013 namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali hal ini diindikasikan akibat adanya perlambatan ekonomi baik nasional maupun global karena sektor yang menyerap tenaga kerja paling dominan di Kota banjarbaru adalah sektor Tersier, seperti perdagangan besar, rumah Makan, Hotel, Angkutan, Perdagangan dan komunikasi, jasa keuangan dan lainnya.

4.2. PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN MANUSIA

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting karena walau bagaimanapun juga manusia merupakan subyek dari pembangunan yang menentukan keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Dimensi Manusia dalam pembangunan, selalu muncul sebagai salah satu isu yang mendunia. Adanya isu seolah-olah mempertanyakan kembali tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada manusia dan hak-hak asasinya. Isu pembangunan manusia tersebut cenderung akan semakin berkembang menjadi kebutuhan untuk diantisipasi, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran politik masyarakat Indonesia dan terbukanya komunikasi menjelang maupun pada saat memasuki era globalisasi, digitalisasi dan informasi yang sering di sebut penduduk dengan generasi milenium. *United Nations Development Programme* (UNDP) menggunakan sebuah indikator komposit yang disebut dengan *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam evaluasi capaian pembangunan manusia antar negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator agregat dari capaian peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan. Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan. IPM mengukur keberhasilan pembangunan dalam 3 dimensi dasar, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan serta dimensi kesejahteraan. Dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf sedangkan dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup dan dimensi kesejahteraan diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Sejak tahun 2015, BPS merilis angka IPM dengan pendekatan perhitungan yang baru. Angka IPM hasil perhitungan yang baru mengukur dimensi yang sama, yaitu dimensi kesehatan,

pendidikan dan ekonomi. Namun indikator yang digunakan mengalami beberapa penyesuaian yaitu: indikator angka melek huruf diganti dengan indikator harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) mengalami perubahan cakupan. RLS lama dihitung dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, sementara RLS pada perhitungan yang baru dihitung dari penduduk yang umurnya 25 tahun ke atas. Indikator konsumsi pada metode baru dihitung dari 96 komoditas, sementara pada metode lama dihitung dari 27 komoditas.

Berikut ini adalah perkembangan capaian pembangunan manusia di Kota Banjarbaru yang digambarkan dalam pencapaian IPM selama 5 (lima) tahun terakhir dengan metode baru, serta posisi pencapaian pembangunan manusia dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel.
Perkembangan dan Peringkat IPM Kota Banjarbaru

Prov/Kab/Kota	IPM					Peringkat
	2010	2011	2012	2013	2014	Tahun 2014
KALIMANTAN SELATAN	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	-
Tanah Laut	63.56	64.35	65.16	66.11	66.50	6
Kota Baru	63.64	64.27	64.87	65.41	65.76	7
Banjar	64.46	64.75	65.04	65.36	65.71	8
Barito Kuala	60.24	60.93	61.62	62.12	62.56	12
Tapin	64.89	65.41	65.92	66.48	66.99	4
Hulu Sungai Selatan	62.80	63.44	64.03	64.59	65.25	9
Hulu Sungai Tengah	63.49	63.90	64.34	64.63	65.37	10
Hulu Sungai Utara	58.50	59.24	60.12	60.77	61.32	13
Tabalong	65.87	66.60	67.36	68.08	68.36	3
Tanah Bumbu	64.98	65.59	66.13	66.51	66.94	5
Balangan	62.88	63.28	63.69	64.03	64.44	11
Kota Banjarmasin	71.01	72.01	73.45	74.59	74.94	2
Kota Banjar Baru	75.49	76.23	76.67	77.10	77.30	1

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Indek Pembangunan Manusia di Kota Banjarbaru dalam periode lima tahun terakhir terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya, serta selalu berada pada peringkat pertama dengan indek diatas IPM Provinsi Kalimantan Selatan (**cetak tebal**). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kota Banjarbaru termasuk cukup berhasil. Dari tahun ke tahun angka IPM Kota Banjarbaru terus meningkat dimana pada tahun 2010 mencapai 75,49.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPM Propinsi Kalimantan Selatan yang baru mencapai 65,20 dan pada tahun 2014 IPM Kota Banjarbaru sudah mencapai 77,30 capaian ini dalam kalsifikasi IPM kelompok capaian Tinggi.

Pada paparan berikut akan digambarkan pencapaian IPM di Kota Banjarbaru ditinjau dari aspek komponen pembentuknya yaitu sektor kesehatan, sektor pendidikan dan kesejahteraan.

A. SEKTOR KESEHATAN

Masalah kesehatan bagi negara-negara berkembang sangat erat kaitannya dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Pada tingkat mikro (individual dan keluarga), kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan mencantumkan azas pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

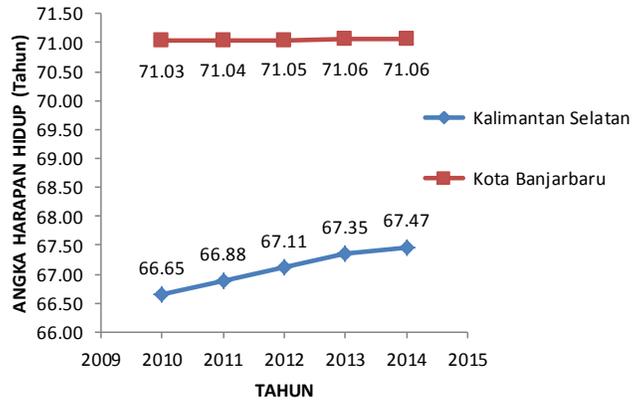
Tantangan peningkatan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan semakin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan dinamika penduduk, epidemiologi penyakit,

perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek dan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektor serta mendorong peran aktif masyarakat.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia di suatu wilayah. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah Kota Banjarbaru terus berupaya meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan kemudahan akses pelayanan. Hal ini untuk mengibangi dinamika dan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat di Kota Banjarbaru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun 2014 terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Banjarbaru, antara lain 6 Rumah sakit, 8 buah Puskesmas, 14 buah Pustu dan 52 buah Apotik Swasta. Jumlah fasilitas kesehatan terjadi peningkatan untuk Apotik Swasta, pada tahun 2013 terdapat 49 apotik sedangkan untuk tahun 2014 terdapat 52 buah.

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi yang dilahirkan. Selama tahun 2014 terdapat 4.374 ibu bersalin sedangkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan berjumlah 4.382 orang. Dari jumlah ibu bersalin tersebut terdapat jumlah kematian bayi sebanyak 27 bayi. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2013 terdapat jumlah kematian bayi sebanyak 34 bayi.

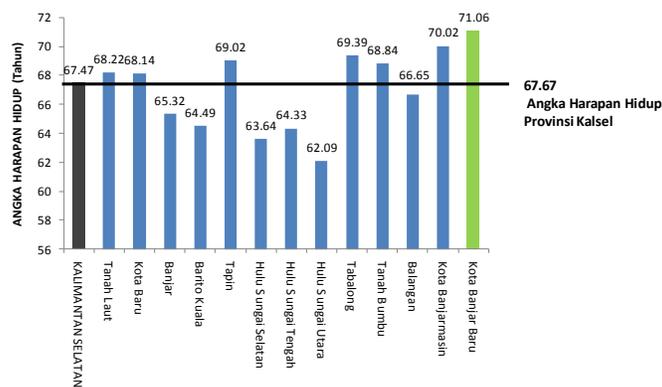
Angka Kematian bayi merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk dan kesehatan masyarakat suatu wilayah. Semakin sedikitnya kejadian kematian bayi menggambarkan telah terjadi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan program pelayanan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat pada akhirnya akan meningkatkan usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah. Perbandingan AHH Kota Banjarbaru dengan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2014 sebagaimana grafik berikut :



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2015

Gambar
Perkembangan Angka Harapan Hidup (e_0) Kota Banjarbaru terhadap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

Perkembangan AHH Kota Banjarbaru mencapai 71,06 tahun 2014 berada diatas rata-rata AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Rata-rata AHH penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 baru mencapai hanya 67,47 tahun. Hal ini mengindikasikan derajat kesehatan di Kota Banjarbaru relatif lebih baik di dibandingkan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah capaian AHH Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014.



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2015

Gambar....
AHH Kota Banjarbaru terhadap Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

A.1. ANGKA KEMATIAN BAYI

Menurut definisi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi tersebut dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kesehatan bayi yang baru lahir dapat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggalnya dan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sistem nilai serta adat istiadat serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia.

Perkembangan keberhasilan pelayanan kesehatan dari indikator jumlah kejadian kematian Bayi di Kota Banjarbaru selama tahun 2010-2014 mengalami pola peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010-2012 terjadi peningkatan dari 19 kasus tahun 2010, kemudian bertambah lagi pada tahun 2011 menjadi 21 kasus dan pada tahun 2012 terjadi kasus kematian bayi sebanyak 40. Sedangkan setelah tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami penurunan kembali, tercatat pada tahun 2014 terdapat 27 kasus kematian bayi. Perkembangan Jumlah Kejadian Kematian Bayi di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel....
Jumlah Ibu Bersalin, Jumlah Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan dan Jumlah Kematian Bayi Tahun 2010-2014

No	Tahun	Ibu Bersalin	Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	Kematian Bayi/ <i>infat Mortality</i>
1	2010	3558	3440	19
2	2011	3993	3925	21
3	2012	4258	4149	40
4	2013	4528	4498	34
5	2014	4374	4382	27

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan angka Kematian Bayi di Banjarbaru. Adanya penurunan AKB memberikan gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Angka Kematian Bayi di Kota Banjarbaru antara lain adalah: (1) faktor aksesibilitas atau tersedianya berbagai fasilitas kesehatan, (2) peningkatan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, dan (3) kesediaan masyarakat untuk mengubah dari pola tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan. Melalui faktor-faktor diatas kejadian kematian dapat ditekan.

Sebaran jumlah kematian bayi pada tahun 2014 hampir terjadi di semua puskesmas wilayah Kota Banjarbaru kecuali Puskesmas Sungai Besar. Jumlah proses persalinan paling banyak terdapat di Puskesmas Guntung Payung dengan persentase 27,63% dengan kasus kematian bayi sebanyak 4 bayi , sedangkan paling sedikit terdapat di Puskesmas Liang Anggang yang hanya 7% dari total banyaknya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan kasus kematian bayi sebanyak 3 bayi. Sebaran kasus kematian bayi per kecamatan di Kota Banjarbaru di sajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel...
Jumlah Kematian Bayi Per Kecamatan di Kota Banjarbaru
Tahun 2014

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Kematian Bayi
1	Landasan Ulin	Landasan Ulin	537	6
		Guntung Payung	1221	4
2	Liang Anggang	Liang Anggang	287	3
3	Cempaka	Rawat Inap Cempaka	307	3
4	Banjarbaru Utara	Banjarbaru Utara	641	3
		Sungai Ulin	375	4
5	Banjarbaru Selatan	Banjarbaru	591	4
		Sungai Besar	415	0
TOTAL			4374	27

Sumber: Statistik Daerah Kota Banjarbaru, diolah (2015)

A.2. ANGKA KEMATIAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

AKI merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu dapat menunjukkan indikasi tingkat kesakitan seorang ibu baik sebelum hamil maupun saat hamil hingga melahirkan. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Kondisi kematian ibu di Kota Banjarbaru selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) berfluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah kematian ibu sebanyak 2 kasus, meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2012 dan turun kembali pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 8 kasus kematian ibu (Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru 2015).

Bila melihat Jumlah absolut Kematian Ibu pada tahun 2014 ada 8 orang merupakan seluruh jumlah kematian ibu yang dilaporkan Puskesmas/RS ke Dinas Kesehatan karena tidak menutup kemungkinan masih ada kematian yang tidak dilaporkan atau tidak terlacak oleh petugas kesehatan. Secara kasar, angka kematian ibu di Kota Banjarbaru tahun 2014 yaitu sebesar 172 /100.000 KH (Profil Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru 2015). Kondisi ini masih tinggi dari target nasional yang ingin dicapai pada tahun 2014 yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu dari 228/100.000 KH tahun 2010 menjadi 118/100.000 KH tahun 2014. Berikut ini adalah jumlah persalinan dan kematian Ibu di Kota banjarbaru tahun 2010-2014.

Tabel
Jumlah Kematian Ibu Kota Banjarbaru

No	Tahun	Jumlah Persalinan	Jumlah kematian ibu	Penyebab Kematian Ibu				
				Pendarahan	hypertensi	infeksi	eklamsia	lain-lain
1	2010	3558	2	2	-	-	-	-
2	2011	3993	5	2	-	-	2	1
3	2012	4258	6	1	-	1	2	2
4	2013	4528	5	1	-	-	2	2
5	2014	4374	8	2	-	-	3	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2015
BPS Kota Banjarbaru, 2015

Dari data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru bahwa jumlah kematian ibu di tahun 2014 sebanyak 8 kematian yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah kematian ibu terbanyak di tahun 2014 berada di Kecamatan Banjarbaru Selatan sebanyak 3 kasus kematian ibu. Berikut data jumlah Kematian Ibu per Kecamatan Di Kota Banjarbaru

Tabel....
Jumlah Kematian Ibu Kota Banjarbaru per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Persalinan	Jumlah kematian
1	Landasan Ulin	1758	1
2	Liang Anggang	287	2
3	Cempaka	307	2
4	Banjarbaru Utara	1016	0
5	Banjarbaru Selatan	1006	3
TOTAL		4374	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, 2015
BPS Kota Banjarbaru, 2015

A.3. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Salah satu target keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan adalah dengan menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Semakin sedikitnya kejadian kematian bayi menggambarkan telah terjadi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kejadian kematian bayi erat kaitannya dengan kondisi kesehatan perempuan pada masa kehamilan, penolong persalinan serta sanitasi. Penyebab kematian bayi antara lain adalah BBLR (berat badan lahir rendah), cacat bawaan, aspirasi susu formula, pneumonia, hipotermida penyempitan saluran cerna. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap angka kematian bayi antara lain adalah faktor aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil serta kesediaan masyarakat untuk mengubah dari pola tradisional; ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan. Melalui faktor-faktor itulah kejadian kematian dapat ditekan.

Penyebab kematian bayi usia di bawah 1 tahun di Kota Banjarbaru juga sangat bervariasi. Berdasarkan data tahun 2012-2013 kasus kematian bayi di Kota Banjarbaru, penyebab kematian bayi terbesar adalah karena BBLR dan Prematur. Keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi (status gizi) saat kehamilan sangat menentukan pertumbuhan bayi dalam kandungan. Keberadaan bayi dengan BBLR atau prematur menunjukkan perlunya penanganan yang lebih

serius pada usia kritis (0-28 hari). Penyebab kematian bayi usia di bawah 1 tahun Kota Banjarbaru dalam kurun waktu 5 (empat) tahun disajikan pada Tabel...

Tabel...
Penyebab Kematian Bayi <1 Tahun

No	Tahun	Jumlah kematian Bayi	Penyebab Kematian Bayi				
			Asfiksia	BBLR dan Prematur	ISPA	Diare	lain-lain
1	2010	19	11	5	-	-	3
2	2011	21	3	4	-	-	14
3	2012	40	12	19	1	1	7
4	2013	34	8	12	1	2	11
5	2014	27	*)	*)	*)	*)	*)

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

*)Data tidak tersedia

Problematika kasus kematian bayi yang ditemui di lapangan dan berdasarkan penjelasan langsung dari pihak tenaga kesehatan, maka faktor-faktor yang berpengaruh pada fluktuasi kasus kematian ibu dan bayi Kota Banjarbaru diklasifikasikan menjadi faktor internal (faktor ibu/genetik, faktor perilaku/gaya hidup/budaya) dan faktor eksternal (pelayanan kesehatan dan lingkungan) sebagai berikut :

1. Faktor Ibu/Genetik

Pada beberapa kasus kematian bayi yang ada di Kota Banjarbaru ditemukan bahwa kondisi ibu mulai dari kehamilan awal hingga persalinan dalam keadaan sakit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi anak mulai dari dalam kandungan hingga setelah lahir. Kematian bayi karena faktor genetik disebabkan oleh Preeklampsia dan eklampsia, Pendarahan abnormal (plasenta previa atau solusio plasenta), Partus lama atau partus macet Demam selama persalinan Infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV). Kondisi kesakitan ibu akan sangat berkaitan erat dengan gaya hidup dan kemampuan tenaga kesehatan yang akan menangani ibu hamil baik saat kontrol kehamilan hingga pertolongan saat melahirkan

2. Faktor gaya hidup/sosial budaya

Faktor gaya hidup dapat diturunkan lagi menjadi pola hidup bersih dan sehat, pola makan, kesadaran masyarakat dalam mengontrol kehamilan pada tenaga medis, hingga perilaku konsumsi obat saat sedang hamil. Secara umum masyarakat di Kota Banjarbaru telah sadar akan PHBS, namun ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa pola hidup masyarakat masih jauh dari pola hidup sehat. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dan kelayakan/kebersihan toilet, pemanfaatan sumber air baku air minum, keberadaan sampah-sampah sebagai agent penyakit.

3. Pelayanan Kesehatan

Penyediaan berbagai macam pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lainnya merupakan kebutuhan wajib ada untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pemberian penanganan yang lebih dalam mengatasi keluhan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang sudah tersedia. Selanjutnya tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya yaitu dengan mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki taraf kesehatannya. Penyebaran fasilitas kesehatan di Kota Banjarbaru boleh dikatakan telah merata dan mudah dijangkau. Masalah yang muncul adalah Jumlah tenaga kesehatan dan penduduk yang harus dilayani kurang sepadan, selain itu kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan yang tersebar masih bervariasi.

4. Faktor Lingkungan dan Sanitasi

Pada penelitian ini faktor lingkungan dibatasi dengan beberapa indikator yaitu, ketersediaan jamban sehat, penggunaan air bersih sebagai sumber air baku, dan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. Sebagian besar wilayah Kota Banjarbaru terutama

telah memiliki fasilitas dan sanitasi yang memadai seperti ketersediaan air bersih dan jamban sehat dengan menggunakan leher angsa. Selain itu, akses rumah tangga terhadap air bersih sudah cukup bagus. Umumnya masyarakat lebih memilih menggunakan air kemasan dan air isi ulang (48,72%). Demikian halnya dengan kepemilikan fasilitas buang air, hampir semua rumah tangga memiliki fasilitas buang air besar sendiri (84,78%), 13,66 persen rumah tangga menggunakan bersama-sama, 0,78 persen rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar umum dan 0,79 persen yang tidak punya fasilitas buang air

B. SEKTOR PENDIDIKAN

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan.

Faktor utama dalam peningkatan pendidikan adalah tersedianya SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan sepenuhnya. Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayan pendidikan di Kota Banjarbaru pada Tahun 2014 tercatat jumlah sekolah negeri di Kota Banjarbaru sebanyak 97 buah. Jumlah tersebut meliputi 6 TK, 67 SD/MI, 14 SMP/MTs, 5 SMA/MA dan 5 SMK. Sementara sekolah swasta berjumlah 202 buah, meliputi 139 TK, 22 SD/MI, 19 SMP/MTs, 12 SMA/MA dan 10 SMK. Sedangkan

pada jenjang pendidikan tinggi terdapat 2 perguruan tinggi negeri dan 10 perguruan tinggi swasta. Kondisi itu memiliki jumlah murid secara keseluruhan 57.446 orang dengan jumlah guru sebanyak 5.341 orang. Rasio atau perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid yang memenuhi standar ideal adalah 1 : 20 dimana pada tahun 2014 rasio guru terhadap murid pada semua jenjang pendidikan sudah di bawah 1:20. Berikut ini rasio guru terhadap murid dan rasio murid terhadap jumlah kelas di kota Banjar baru.

Tabel....
Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	1:15	1:17	1:18	1:15
2	SMP/MTs	1:12	1:13	1:14	1:11
3	SMA/MA	1:10	1:10	1:10	1:8
4	SMK	1:09	1:10	1:08	1:06

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, 2015

Tabel....
Rasio Murid Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	SD	1:29	1:27	1:29	1:28
2	SMP	1:34	1:31	1:29	1:33
3	SMA	1:30	1:30	1:29	1:26

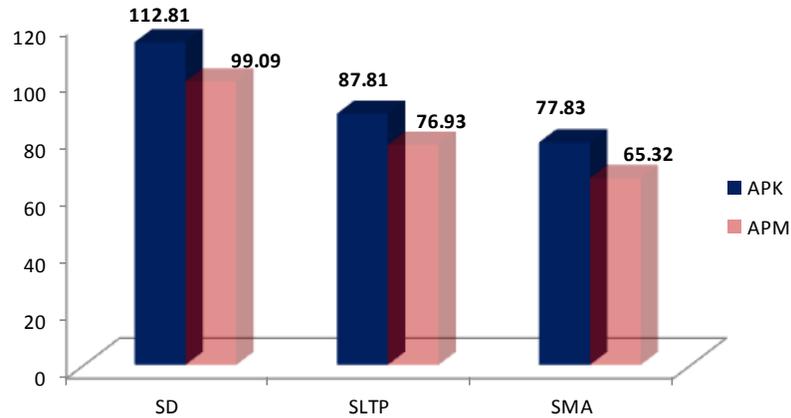
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, 2015

Keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi atau kabupaten/kota salah satu tolok ukurnya adalah tingkat partisipasi sekolah. Semakin tinggi tingkat partisipasi sekolah maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Angka Partisipasi sekolah ada dua yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan APM merupakan proporsi jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah untuk melihat tingkat partisipasi penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu

Pada tahun 2014 partisipasi sekolah penduduk Kota Banjarbaru sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari APK SD yang mencapai 112,81 artinya hanya terdapat 12,81 penduduk diluar usia SD yang sedang sekolah di SD. APM SD sendiri sebesar 99,09 artinya ada 99,09 persen anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD hanya 0,91 persen penduduk usia tersebut yang tidak sedang sekolah SD, kemudian APK SLTP mencapai 87,81 persen dan APK SLTA mencapai 77,83 persen serta APM SLTP 76,93 persen dan APM SLTA sebesar 65,32 persen.

Jika dilihat secara umum, APM dari jenjang pendidikan terendah (SD) sampai pada jenjang pendidikan yang tinggi (SLTA) cenderung menurun, yang berarti partisipasi penduduk untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Berikut ini gambaran indikator pendidikan (APK, dan APM) di Kota Banjarbaru pada Tahun 2014.



Sumber: Statistik Daerah Kota Banjarbaru, 2015

Grafik
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banjarbaru Tahun 2014

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tidak dapat tercapai secara optimal apabila tidak dapat diakses oleh seluruh penduduk. Masih rendahnya capaian APM pada jenjang pendidikan SLTA di Kota Banjarbaru menunjukkan terdapatnya anak yang belum mendapat akses pendidikan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar pendidikan 12 tahun belum mampu mencakup seluruh anak usia sekolah terutama masyarakat miskin sehingga mereka pada usia itu berhenti sekolah dan memilih bekerja. Oleh karena itu pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan intervensi kebijakan dalam upaya peningkatan akses pendidikan bagi kelompok miskin, baik berupa dana tambahan untuk menunjang operasional sekolah yang dikenal sebagai Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin/Kartu Indonesia Pintar ataupun penyediaan sarana sekolah yang lebih merata.

B.1. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang

pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

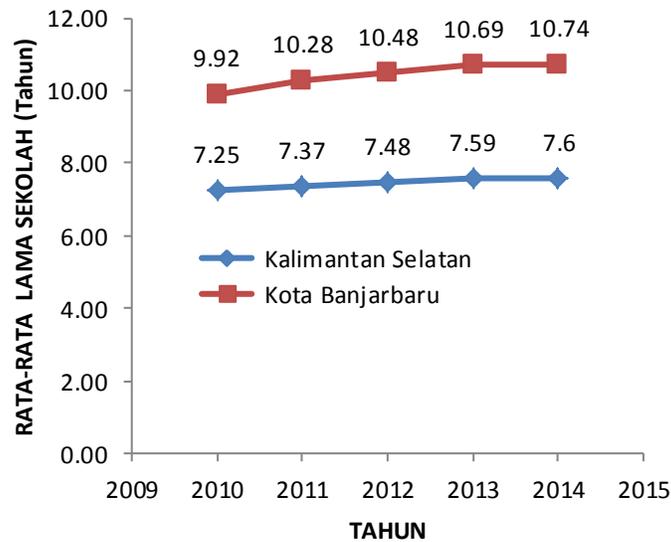
Pada tahun 2014 capaian rata-rata lama sekolah Kota Banjarbaru mencapai 10,74 tahun dari capaian maksimal jenjang pendidikan selama 18 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banjarbaru memiliki rata-rata lama sekolah sampai jenjang pendidikan SLTA kelas 1 (satu). Capaian ini merupakan capaian rata-rata lama sekolah yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian rata-rata lama sekolah ini menunjukkan bahwa penuntasan wajib belajar tingkat dasar dan menengah masih belum selesai sehingga perlu upaya yang lebih intens lagi dari berbagai pihak sehingga minimal wajib belajar 12 tahun tercapai. Untuk melihat capaian jenjang pendidikan berdasarkan rata-rata lama sekolah disajikan pada Tabel....

Tabel...
Konversi Tahun Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pendidikan

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah (th)
Tidak punya ijazah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	18

Sumber : BPS Prov.Kalsel, 2016

Tabel. ...diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah sampai tingkat pendidikan S2/S3 adalah selama 18 tahun. Angka 10,74 tahun capaian rata-rata lama sekolah Kota Banjarbaru memberikan gambaran bahwa program wajib belajar 9 tahun di Banjarbaru telah tercapai dan program wajib belajar 12 tahun masih perlu di upayakan terus-menerus. Berikut ini Grafik ...menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kota Banjarbaru



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2015

Grafik
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Banjarbaru
Tahun 2010-2014

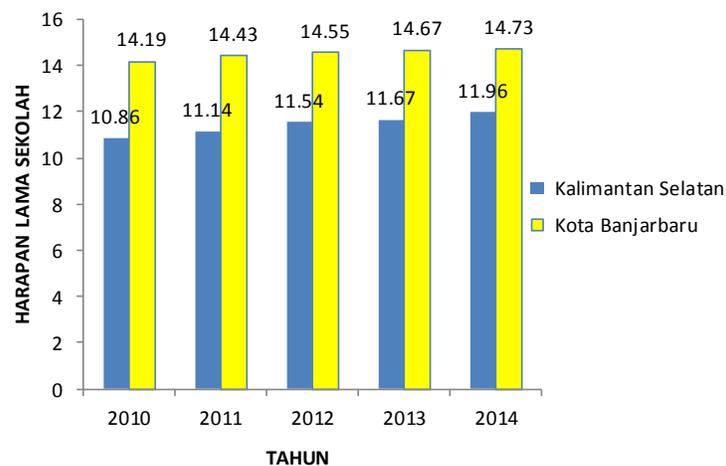
Pada grafik di atas terlihat bahwa Rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru selama tahun 2010-2014 berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah sebesar 2,01 persen.

B.2. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Selain indikator rata-rata lama sekolah, indikator lain yang berpengaruh pada sektor pendidikan dalam pembangunan manusia adalah harapan lama sekolah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah berguna untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Secara umum, capaian Harapan lama sekolah Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) 0,94

persen, sebagaimana halnya Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah di banjarbaru berada di diatas angka Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010, angka harapan lama sekolah Kota Banjarbaru mencapai angka 14,19 tahun artinya setiap penduduk di Kabupaten Kotabaru diharapkan dapat bersekolah hingga 14,19 tahun lamanya atau diharapkan dapat bersekolah hingga mencapai pendidikan D2. Pada tahun 2014, harapan lama sekolah Kota Banjarbaru meningkat sedikit dan masih pada kisaran 14 tahun tepatnya adalah 14,73 tahun, artinya penduduk Kota Banjarbaru diharapkan masih dapat bersekolah hingga mencapai pendidikan D2..Angka harapan lama sekolah sangat berbanding lurus dan memiliki pengaruh positif dengan angka partisipasi murni (APM) karena itu harapan lama sekolah dapat ditingkatkan dengan upaya pencegahan seminim mungkin angka putus sekolah. Berikut ini adalah perkembangan harapan lama sekolah Kota Banjarbaru terhadap Provinsi Kalimantan Selatan.



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2015

Grafik
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Banjarbaru
Tahun 2010-2014

B.3. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Pendidikan pada konteks yang lebih maju merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk diantaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya : pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kekerjaan (*employment*); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh

Pembangunan pendidikan di Kota Banjarbaru sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dikaitkan dengan komponen pembentuk IPM, rata-rata lama sekolah telah mencapai 10,74 yang berarti rata-rata penduduk Kota Banjarbaru mencapai pendidikan pada jenjang SLTA kelas 1 dan berada pada posisi pertama dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Komponen lainnya adalah harapan lama sekolah kota Banjarbaru juga berada pada posisi pertama di Kalimantan Selatan dengan angka harapan lama sekolah 14,73.

Beberapa kondisi pendidikan di Kota Banjarbaru yang masih menjadi permasalahan dan perlu dibenahi untuk meningkatkan capaian pembangunan pendidikan dalam peningkatan Komponen IPM sektor pendidikan adalah bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah APK dan APM, hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua lulusan sekolah pada jenjang yang lebih rendah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada jenjang pendidikan lanjutan atas APM sebesar 65,32 persen menyiratkan hanya sebanyak 65% orang dari 100 penduduk usia 16-18 tahun yang mengikuti pendidikan di bangku SLTA. Beberapa hal yang terungkap di lapangan atas hasil capaian APK dan APM yang semakin rendah ketika jenjang pendidikan semakin tinggi yaitu dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pendidikan seiring dengan bertambah tinggi jenjang pendidikan dan keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang lebih tinggi (belum meratanya sebaran sarana sekolah jenjang SLTA sederajat di tingkat kecamatan, untuk beberapa kelurahan, relatif jauhnya sekolah yang dituju, menyebabkan biaya operasional menuju sekolah cenderung besar, sehingga orang tua siswa yang berpenghasilan menengah ke bawah cenderung untuk tidak melanjutkan anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi).

C. SEKTOR EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Oleh sebab itu, pembangunan bidang ekonomi harus dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang lain.

Pada umumnya pembangunan ekonomi diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas digerakan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat, walaupun angka tidak terlalu tinggi, jauh lebih tinggi kualitasnya karena mempengaruhi pembangunan manusia diantaranya dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga banyak penduduk yang memiliki

cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk membeli kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia.

Data indeks pembangunan manusia provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat sebagai indikator tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan menempati urutan ketiga secara nasional dengan pengeluaran perkapita provinsi sebesar Rp. 10.748.000/tahun. Pada tingkat provinsi, sektor ekonomi Kabupaten Kota Banjarbaru dilihat dari pengeluaran perkapita masyarakatnya menempati posisi kedua setelah kota Banjarmasin dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp. 12.376.000/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru relatif lebih baik di bandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi masih bisa di tingkatkan agar Kota Banjarbaru sejajar dengan Kota-kota lain di Indonesia.

C.1. PRODUK NASIONAL BRUTO (GNP) – PPP (PARITAS DAYA BELI)

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di daerah dalam lingkup Kabupaten/Kota adalah jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun, atau disebut produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB pada suatu waktu tertentu dapat digunakan sebagai cerminan kinerja perekonomian dan sebagai gambaran struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan perbandingan PDRB antar waktu bisa digunakan sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Perekonomian Kota Banjarbaru yang diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 secara agregat menunjukkan

perkembangan yang terus meningkat selama periode 2010–2014. Pada tahun 2014, PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga berlaku sebesar 5,82 Triliyun rupiah, sementara atas dasar harga konstan sebesar 4,46 Triliyun rupiah. Angka yang dicapai pada tahun 2014 ini lebih besar dibandingkan dengan angka yang dicapai pada tahun sebelumnya. Secara kuantitas, ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013. Secara tahunan besaran PDRB kota Banjarbaru dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas kegiatan ekonomi Kota Banjarbaru mengalami peningkatan baik dari nilai nominal maupun realitas produksinya. Berikut ini Tabel perkembangan PDRB di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel
Perkembangan PDRB ADH Konstan dan Berlaku dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2010–2014

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juataan Rupiah)	PDRB ADH Konstan 2010 (Juataan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi
2010	3,475,509	3,475,509	5.85
2011	3,902,313	3,683,619	5.99
2012	4,366,554	3,924,617	6.54
2013*)	4,951,498	4,182,998	6.58
2014**)	5,822,747	4,461,020	6.65

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2015

*) *Angka Sementara*

***) *Angka Sangat Sementara*

Pada tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru selama tahun 2010-2014 terus menerus menunjukan pertumbuhan yang positif dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65 persen yang berarti produksi barang dan jasa yang dihasilkan naik sebesar 6,65 persen dibandingkan tahun 2013.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.

C.2.STANDAR HIDUP LAYAK (KHL) – DAYA BELI YANG DISESUAIKAN

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian di suatu wilayah. Standar hidup layak berkaitan dengan daya beli masyarakat yang dipengaruhi perubahan inflasi di suatu daerah. Daya beli menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan daya beli dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan dan menurunkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar suatu wilayah dengan wilayah lain berbeda.

Daya beli penduduk Kota Banjarbaru yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sebesar Rp. 11.953.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp.12.376.000,- 2014. Pada tahun yang sama kemampuan daya beli Kalimantan Selatan sebesar Rp. 10.304.000,- dan Rp. 10.748.000,-.selama periode 2010-2014 kemampuan daya beli masyarakat Kota Banjarbaru menunjukkan kecenderungan meningkat begitu pula provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan daya beli masyarakat berkaitan dengan pembangunan manusia pada pola konsumsi. Hal ini karena pada pola konsumsi tercermin pola alokasi pendapatan kepada berbagai macam pengeluaran yang berbentuk makanan dan non makanan.

Berdasarkan data PDRB menurut pengeluaran, proporsi distribusi pengeluaran konsumsi makanan di kota Banjarbaru menurun sebesar 0,36% pada tahun 2014 di bandingkan tahun 2010 dengan besaran 41,92 persen pada tahun 2010 menjadi 41,77 persen pada tahun 2014. Begitu pula sebaliknya konsumsi non makanan mengalami sedikit peningkatan dari 58,08 persen di tahun 2010 menjadi 58,23 persen di tahun 2014. Pada daerah yang memiliki kemampuan ekonomi maju dan sejahtera, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50 persen. Dengan demikian, secara umum di Kota Banjarbaru terjadi perubahan pola konsumsi ke arah yang lebih maju atau sejahtera. Berikut ini adalah Tabel distribusi proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan di Kota Banjarbaru.

Tabel
Distribusi proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2014

Tahun	Proporsi Konsumsi (%)	
	Makanan	Bukan Makanan
2010	41.92	58.08
2011	41.47	58.53
2012	41.86	58.14
2013*)	41.70	58.30
2014**)	41.77	58.23

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2015

*) *Angka Sementara*

***) *Angka Sangat Sementara*

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat Kota Banjarbaru.

Secara umum semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka porsi konsumsi makanan semakin berkurang, hal ini disebabkan konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi non makanan. Dengan demikian pola konsumsi makanan dan non makanan sedikit banyak dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk atau rumah tangga.

C.3. ANALISIS SEKTOR UNGGULAN / TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN

DAERAH

Perkembangan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Perubahan struktur ekonomi sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumberdaya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien.

Pada tahun 2010-2014 komposisi struktur perekonomian Kota Banjarbaru masih didominasi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Secara umum ada 4 kategori yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB ADH berlaku Kota Banjarbaru yaitu : (1) Jasa Kemasyarakatan dan lainnya; (2) Pengangkutan dan komunikasi; (3) Bangunan, dan (4) perdagangan, Hotel dan Restoran. Keempat kategori itu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Banjarbaru secara rata-rata periode tahun 2010-2014 . sebesar 79,38%.

Peranan sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dari 67,81 persen pada tahun 2010 menjadi 70,39 persen pada tahun 2014. Hal ini

dikarenakan sektor jasa-jasa yang terus mengalami perkembangan. Sementara itu, peranan sektor sekunder cenderung mengalami penurunan sedikit dibanding tahun 2010, yaitu dari 25,05 persen pada tahun 2010 menjadi 23,48 persen di tahun 2014. Hal ini merupakan kelanjutan dari adanya perkembangan perhotelan dan restoran di kota Banjarbaru sejak tahun 2012. Berikut ini adalah Tabel struktur perekonomian kota Banjarbaru tahun 2010-2014 berdasarkan lapangan usaha.

Tabel
Struktur Perekonomian Kota Banjarbaru tahun 2010-2014

Lapangan Usaha	Tahun				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
Sektor Primer	7.14	6.94	6.85	6.54	6.13
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.61	2.49	2.36	2.29	2.16
Pertambangan dan Penggalian	4.53	4.45	4.49	4.25	3.97
Sektor Sekunder	25.05	24.7	24.02	23.15	23.48
Industri Pengolahan	9.17	9.04	8.73	8.23	8.08
Listrik, gas dan air	0.85	0.84	0.75	0.71	0.71
Bangunan	15.03	14.82	14.54	14.21	14.69
Sektor Tersier	67.81	68.36	69.13	70.31	70.39
Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.18	13.32	13.33	13.12	13.36
Pengangkutan dan Komunikasi	23.35	24.01	24.71	26.41	26.25
Keuangan, Asuransi, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.56	4.54	4.47	4.49	4.35
Jasa kemasyarakatan dan lainnya	26.72	26.49	26.62	26.29	26.43
PDRB Kota Banjarbaru	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2015

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan kondisi wilayah dan pola kehidupan penduduk Kota Banjarbaru yang terus berkembang maka pola aktivitas perekonomian mengalami pergeseran dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang perekonomiannya bertumpu pada sektor sekunder dan tersier. Sektor yang menjadi lapangan usaha masyarakat Kota Banjarbaru, seperti pada sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya termasuk jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Hal ini mengakibatkan sektor primer yaitu pertanian semakin menurun kontribusinya dalam perekonomian Kota Banjarbaru. Selain itu dampak perpindahan kantor pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru menjadikan lahan pertanian

mengalami pergeseran fungsi yaitu sebagian besar lahan difungsikan sebagai lahan non pertanian, terbesar adalah untuk pemukiman penduduk. Sehingga konversi lahan pertanian ke non pertanian sangat cepat, akibatnya lahan bagi usaha pertanian semakin terbatas ditambah keengganan tenaga kerja usia muda memasuki sektor primer ini menyebabkan semakin berkurangnya produksi dan nilai tambah yang mampu dihasilkan sektor pertanian dalam denyut perekonomian Kota Banjarbaru.

4.3. PROGRAM PEMERINTAH YANG TELAH DIJALANKAN

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan suatu pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan terutama program-program dalam upaya peningkatan pembangunan manusia pada sektor-sektor terkait. Keberhasilan pembangunan manusia sangat terkait dan tidak lepas dari keberhasilan capaian program dan realisasi programnya, namun setiap target dan capaian program sangat dipengaruhi oleh faktor politik (kebijakan yang di pilih pemerintah) dan anggaran belanja daerah.

A. SEKTOR KESEHATAN

Program pemerintah yang telah dilaksanakan dalam peningkatan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2015:

- a). Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan pelayanan KB, dan peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
- b). Program Perbaikan Gizi Masyarakat, melalui peningkatan pelayanan kesehatan status gizi masyarakat

- c). Program Pengembangan Lingkungan Sehat, melalui program-program peningkatan penyehatan lingkungan air, peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman, peningkatan penyehatan lingkungan TTU dan TPM, koordinasi pengembangan kawasan Kota Sehat, dan percepatan IPKM.
- d). Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui peningkatan sarana dan prasaranan puskesmas, ketercapaian rasio dokter dengan jumlah penduduk, dan peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya, serta Peningkatan Pelayanan, Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas),
- e). Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic, pelayanan pemeliharaan kesehatan, Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat, Sosialisasi dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- f). Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, melalui Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pembinaan Imunisasi dan Peningkatan Surveilans, Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

B. SEKTOR PENDIDIKAN

Program pemerintah yang telah dilaksanakan dalam peningkatan pembangunan kualitas pendidikan di Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2015:

- a). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui peningkatan mutu dan etos kerja guru, meningkatkan jumlah SMK berkualitas serta sekolah berstandar nasional dan bertaraf internasional
- b). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui Penyediaan basis data nama dan alamat yang akurat dan mutakhir tentang penduduk usia 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah dan putus sekolah pendidikan dasar dan menengah, penyediaan basis data siswa dan guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, dan penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) di setiap satuan pendidikan dengan kepala sekolah sebagai supervisi, serta mewujudkan aplikasi PADATIWEB dalam pengelolaan data SD/MI, SMP/MTs , SMA/MA/SMK.
- c). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, melalui Penyediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
- d). Program Pendidikan Menengah diorientasikan pada rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA, peningkatan angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/paket C, angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/paket C, angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, Jumlah siswa yg mengikuti Olimpiade Sains, dan Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT

C. SEKTOR EKONOMI

Program pemerintah yang telah dilaksanakan dalam peningkatan pembangunan daya saing perekonomian daerah di Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2015:

- a). Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, melalui fasilitasi pengembangan UKM, meningkatkan permodalan dan pendampingan bagi UKM serta perencanaan koordinasi pengembangan UKM.
- b). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif melalui penguatan jaringan cluster industri, penciptakan produk unggulan di setiap kecamatan.
- c). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui penyediaan pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulan UKM, peningkatan Kemitraan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran.
- d). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, melalui peningkatan pengaktifan koperasi, Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi.
- e). Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dan pemerataan kesejahteraan rakyat, melalui Peningkatan Kesempatan Berusaha/iklim usaha, Pemasaran Brand Daerah (Banjarbaru menjadi tujuan utama investasi bidang perdagangan dan industri di Kalimantan selatan)

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1. SEBARAN DAN PENATAAN PASAR LOKAL, PUSAT PERBELANJAAN MODERN, DAN TOKO MODERN DI KOTA BANJARBARU

5.2. DAMPAK PASAR MODERN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARBARU

Jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota ditetapkan tujuh jenis objek pajak dan perluasan pajak daerah sangat dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 2 ayat 4 UU Pajak Daerah. Peraturan yang mengatur pajak daerah untuk kabupaten / kota adalah PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang menjelaskan objek, subjek dan dasar pengenaan pajak, ketentuan tariff.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian C, pajak parkir. Tariff pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Sekarang ini pajak daerah selain yang tersebut di atas ada beberapa hasil pajak pusat yang dibagi ke daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) yang sekarang diserahkan urusannya ke kabupaten/kota sehingga menjadi pajak daerah.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Objek retribusi berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jenis jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi hanya jenis tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi yang layak sebagai objek retribusi. Ada tiga kelompok yang dapat dijadikan retribusi daerah yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

Keberadaan pasar modern memberikan potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peluang pajak daerah yang dapat dipungut dari keberadaan pasar modern/ritel modern adalah dengan adanya beberapa kegiatan ritel tersebut dalam menarik pelanggan yaitu membuka kafe dan kegiatan hiburan maka pajak daerah yang dapat dipungut adalah pajak restoran dan pajak hiburan. Ritel modern juga memberikan pelayanan parkir maka dapat dipungut sebagai pajak parkir mengingat potensi pelanggan ritel modern rata-rata lebih dari 100 pelanggan per hari. Ritel modern juga memasang reklame dan iklan dalam menarik pelanggan maka pemasangan reklame dan iklan ini menjadi potensi pajak daerah.

Bagi ritel modern yang baru mendirikan bangunan perlu dilihat apakah sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau belum sebagai potensinya, kemudian perlu dilihat juga apakah dalam proses pemilikan dan pembangunan sudah membayar BPHTB yang juga merupakan potensi pajak daerah.

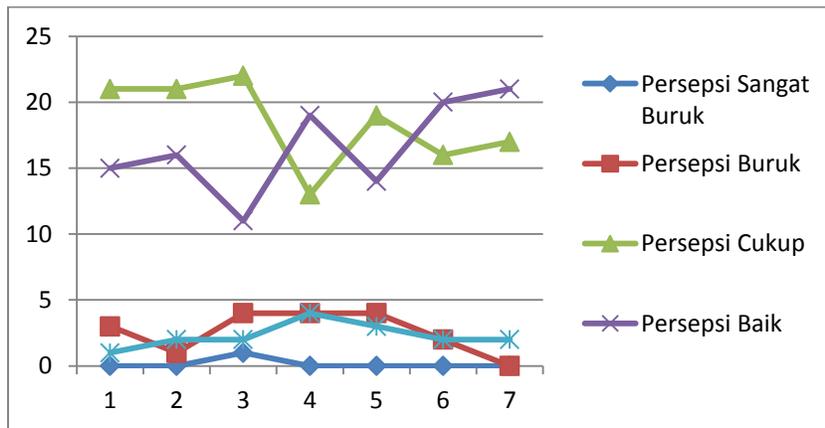
Potensi retribusi daerah yang potensial dengan keberadaan ritel modern apabila pemungutannya memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan. Potensi retribusi yang dapat dilihat oleh pemerintah kota Banjarbaru dalam keberadaan ritel modern/pasar modern ini adalah potensi retribusi sampah/penyelenggaraan kebersihan yaitu pembayaran atas jasa persampahan dan atau kebersihan khusus disediakan alat/sarana oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objeknya termasuk toko, swalayan, minimarket/supermarket, termasuk PKL. Subjeknya dapat pribadi atau badan yang harus membayar retribusi. Tarifnya disesuaikan dengan golongan dan NJOP objek pajak, misalnya ritel modern tergantung NJOP sehingga menentukan golongan tarifnya.

Berdasarkan definisi bahwa ritel modern termasuk pasar modern, walaupun bukan pasar daerah yang keberadaannya tumbuh dan dibangun sendiri oleh individu dan badan, dan kebanyakan adalah ritel modern yang merupakan franchise dari badan usaha yang besar seperti alfa mart, indomaret, foodmart dll, maka sudah selayaknya juga potensial termasuk yang harus dipungut sebagai pajak pasar/retribusi pasar dan paling tidak pajak perijinan usahanya yang dikenakan pajak daerah. Hal ini harus dikaji lebih dalam lagi.

5.3. GAMBARAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI KOTA BANJARBARU

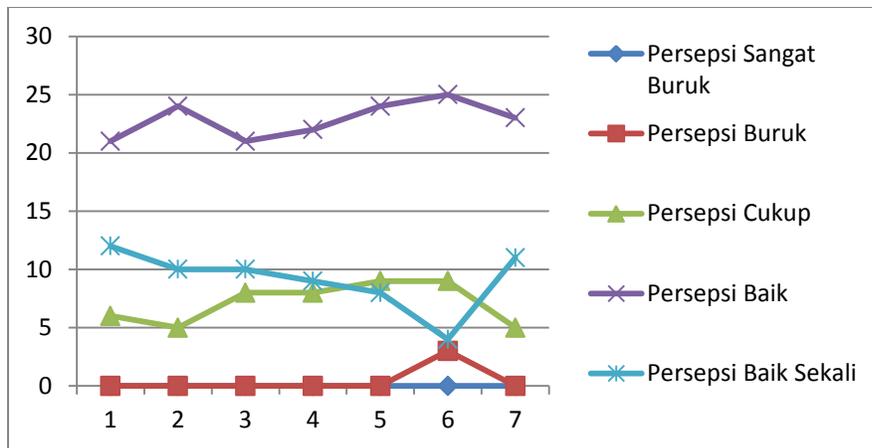
1. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Tradisional

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	3	21	15	1
2	Kenyamanan Berbelanja	0	1	21	16	2
3	Keteraturan	1	4	22	11	2
4	Kemudahan Akses	0	4	13	19	4
5	Ketersediaan Fasilitas	0	4	19	14	3
6	Kebiasaan Berbelanja	0	2	16	20	2
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	17	21	2



2. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Modern

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	0	6	21	12
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	5	24	10
3	Keteraturan	0	0	8	21	10
4	Kemudahan Akses	0	0	8	22	9
5	Ketersediaan Fasilitas	0	0	9	24	8
6	Kebiasaan Berbelanja	0	3	9	25	4
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	5	23	11



2. Karakteristik Responden Toko/Kios Modern (Foodmart, Mart plus, dan Minimart Lainnya)

N O .	NAMA TOKO	NAMA PEMILIK USAHA	IJIN USAHA	TEMPAT USAHA	MODAL USAHA	INVESTASI AWAL	OMSET PENJUALAN/HARI	KEUNTUNGAN USAHA	JUMLAH PELANGGAN /HARI	JUMLAH TK/ORANG
1	Foodmart	Mochtar Riady	1	1	150,000,000.00	500,000,000.00	4,500,000.00	30%	48	4
2	Foodmart	Saipul Anwar	1	0	50,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000.00	10%	40	3
3	Foodmart	Rahman A	1	1	200,000,000.00	600,000,000.00	5,000,000.00	33%	50	5
4	Foodmart	Saipul Anwar	1	1	70,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000.00	10%	50	4
5	Foodmart	Matahari Putra Prima	1	1	500,000,000.00	500,000,000.00	10,000,000.00	50%	120	6
6	MartPlus	Hendry Soefian	1	1	150,000,000.00	500,000,000.00	8,000,000.00	40%	200	7
7	Mini Market Happy	H.Jasmani	1	1	100,000.00	200,000,000.00	1,500,000.00	20%	30	5
8	Swalayan	Dartono Limin	1	1	350,000,000.00	300,000,000.00	7,000,000.00	10%	50	6

Keterangan :
 Ada Ijin Usaha =1
 Tidak Ada Ijin Usaha=0

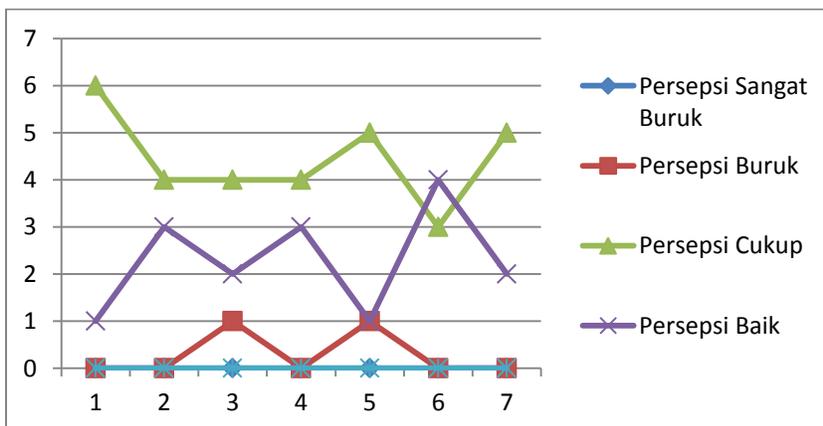
TempatUsaha Cukup/Sangat Strategis=1
 TempatUsaha Kurang Strategis=0

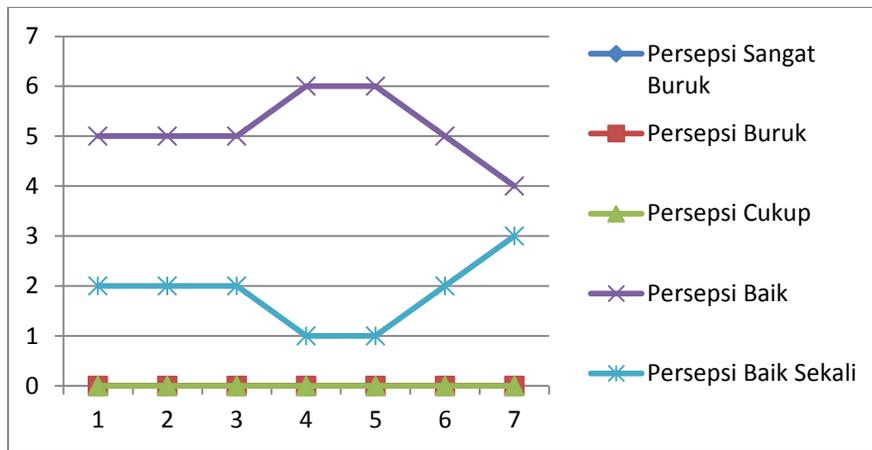
1. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Tradisional

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	0	6	1	0
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	4	3	0
3	Keteraturan	0	1	4	2	0
4	Kemudahan Akses	0	0	4	3	0
5	Ketersediaan Fasilitas	0	1	5	1	0
6	Kebiasaan Berbelanja	0	0	3	4	0
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	5	2	0

2. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Modern

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	0	0	5	2
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	0	5	2
3	Keteraturan	0	0	0	5	2
4	Kemudahan Akses	0	0	0	6	1
5	Ketersediaan Fasilitas	0	0	0	6	1
6	Kebiasaan Berbelanja	0	0	0	5	2
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	0	4	3





2. Karakteristik Responden
Toko/Kios Modern (Alfamart)

N O.	NAMA TOKO	NAMA PEMILIK USAHA	IJIN USAHA	TEMPAT USAHA	MODAL USAHA	INVESTASI AWAL	OMSET PENJUALAN/HARI	KEUNTUNGAN USAHA	JUMLAH PELANGGAN /HARI	JUMLAH TK/ORANG
1	Alfamart	Tuti Marshella	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	300,000,000.00	300,000,000.00	10,000,000.00	30%	200	6
2	Alfamart	Agus Pranata	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	300,000,000.00	700,000,000.00	10,000,000.00	25%	300	10
3	Alfamart	PT.Sumber Alfaria	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	200,000,000.00	500,000,000.00	7,000,000.00	33%	250	7
4	Alfamart	Joko Susanto	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	300,000,000.00	700,000,000.00	13,000,000.00	40%	300	9
5	Alfamart	Agustri Susanto	ADA/T DP&SI UP	SangatS strategis	200,000,000.00	500,000,000.00	10,000,000.00	40%	120	6
6	Alfamart	Hendry Soefian	ADA/SI UP	Cukup Strategis	150,000,000.00	500,000,000.00	8,000,000.00	40%	120	6
7	Alfamart	PT.Sumber Alfaria	ADA/SI UP	Cukup Strategis	150,000,000.00	200,000,000.00	2,000,000.00	5%	20	2
8	Alfamart	Mat Rafii	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	300,000,000.00	500,000,000.00	8,000,000.00	25%	200	8
9	Alfamart	Joko Siswanto	ADA/SI UP	Cukup Strategis	200,000,000.00	500,000,000.00	10,000,000.00	40%	250	7
10	Alfamart	Rahman A	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	200,000,000.00	600,000,000.00	5,000,000.00	33%	50	5
11	CV	I Gde Tony	ADA/T	Cukup				20%	100	20

	Mandala	Gunawan	DP&SI UP	Strategis	600,000,000.00	500,000,000.00	7,000,000.00			
12	Alfamart	Joko Susanto	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	300,000,000.00	700,000,000.00	13,000,000.00	40%	381	13
13	Alfamart	dirahasiakan	ADA/T DP&SI UP	SangatS strategis	200,000,000.00	500,000,000.00	10,000,000.00	40%	120	10
14	Alfamart	Bayu Indra Permana	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	500,000,000.00	450,000,000.00	5,000,000.00	18%	120	6
15	Alfamart	Suryo Nugroho	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	600,000,000.00	550,000,000.00	10,000,000.00	25%	300	11
16	Alfamart	Agus Tri Susanto	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	500,000,000.00	450,000,000.00	10,000,000.00	20%	200	8
17	Alfamart	Joko Susanto	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	300,000,000.00	700,000,000.00	20,000,000.00	40%	300	7
18	Alfamart	Agustri Susanto	ADA/T DP&SI UP	SangatS strategis	200,000,000.00	500,000,000.00	10,000,000.00	40%	120	5
19	Alfamart	Suryo Nugroho	ADA/T DP&SI UP	Cukup Strategis	300,000,000.00	700,000,000.00	10,000,000.00	40%	300	9

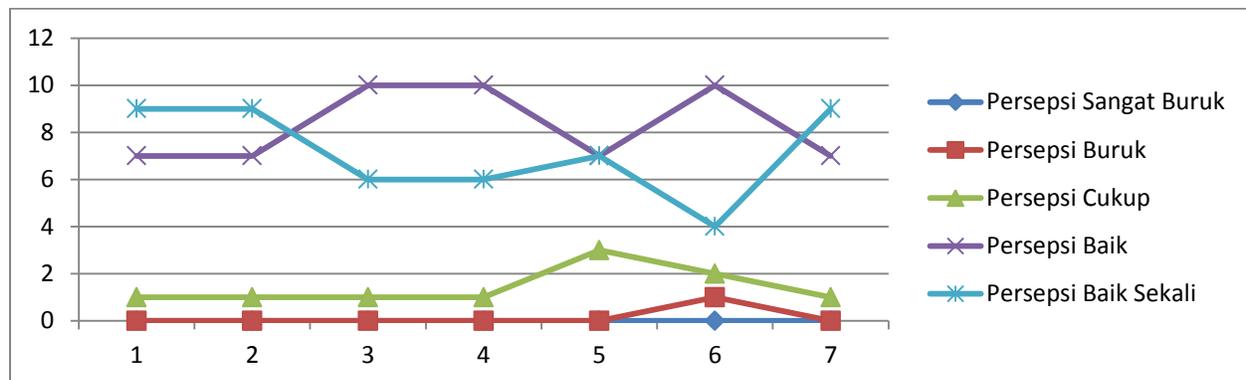
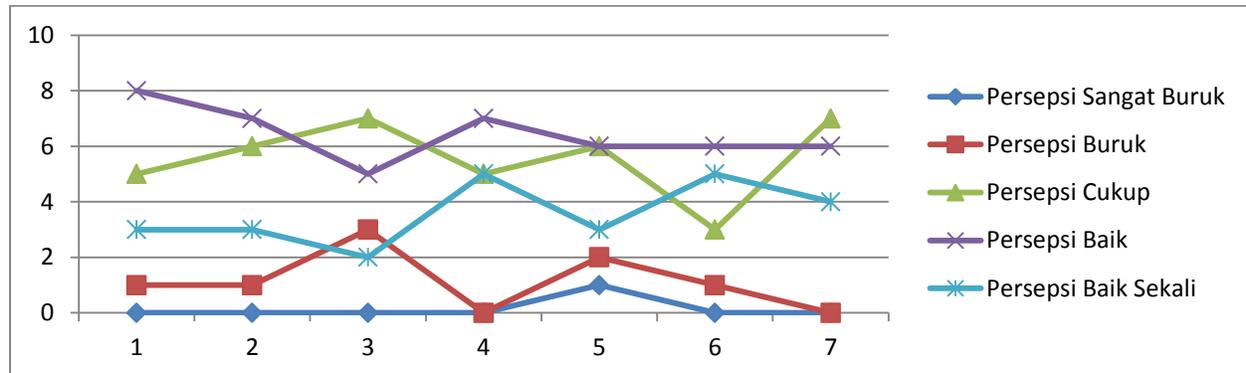
1. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Tradisional

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	1	5	8	3
2	Kenyamanan Berbelanja	0	1	6	7	3
3	Keteraturan	0	3	7	5	2
4	Kemudahan Akses	0	0	5	7	5
5	Ketersediaan Fasilitas	1	2	6	6	3
6	Kebiasaan Berbelanja	0	1	3	6	5
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	7	6	4

2. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Modern

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	0	1	7	9
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	1	7	9
3	Keteraturan	0	0	1	10	6
4	Kemudahan Akses	0	0	1	10	6
5	Ketersediaan Fasilitas	0	0	3	7	7
6	Kebiasaan Berbelanja	0	1	2	10	4

7	Kualitas Barang Belanja	0	0	1	7	9
---	-------------------------	---	---	---	---	---



2. Karakteristik Responden Toko/Kios Modern (Indomaret)

N O .	NAM A TOKO	NAMA PEMILIK USAHA	IJIN USAHA	TEMPA T USAHA	MODAL USAHA	INVESTASI AWAL	OMSET PENJUALAN/H ARI	KEUNTUN GAN USAHA	JUMLAH PELANGGAN/ HARI	JUMLAH TK/ORAN G
1	Indom aret	Salim Grup	ADA/T DP&SIU P	SangatS strategis	300,000, 000.00	500,000,0 00.00	9,000,000.00	20%	200	10
2	Indom aret	Ahmad Ruslianto Wibowo	ADA/T DP&SIU P	Cukup Strategi s	200,000, 000.00	500,000,0 00.00	9,000,000.00	11%	240	8
3	Indom aret	Salim Grup	ADA/T DP&SIU P	Cukup Strategi s	300,000, 000.00	550,000,0 00.00	10,000,000.00	25%	300	8

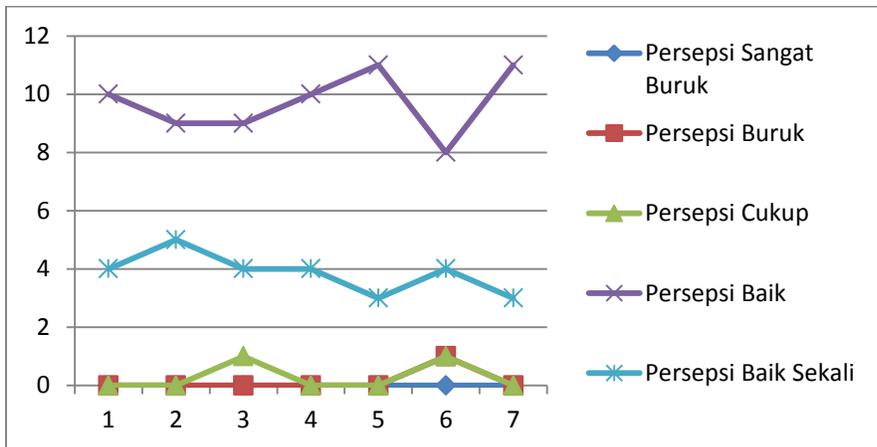
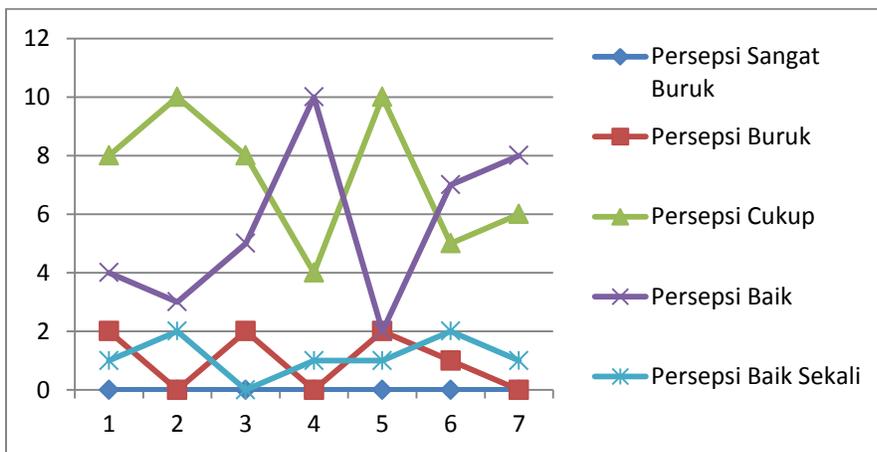
4	Indomaret	Ahmad Ruslianto Wibowo	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	200,000,000.00	550,000,000.00	10,000,000.00	20%	250	9
5	Indomaret	Salim Jonathan	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	100,000,000.00	400,000,000.00	15,000,000.00	30%	400	12
6	Indomaret	Salim Grup	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	200,000,000.00	500,000,000.00	11,000,000.00	40%	228	9
7	Indomaret	Ahmad Ruslianto Wibowo	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	300,000,000.00	550,000,000.00	13,000,000.00	25%	300	8
8	Indomaret	Salim Grup	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	350,000,000.00	500,000,000.00	15,000,000.00	20%	500	13
9	Indomaret	Salim Jonathan	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	200,000,000.00	300,000,000.00	8,000,000.00	15%	40	9
10	Indomaret	Ahmad Ruslianto Wibowo	ADA/T DP&SIUP	Cukup Strategis	350,000,000.00	500,000,000.00	20,000,000.00	35%	450	13
11	Indomaret	Salim Jonathan	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	300,000,000.00	550,000,000.00	13,000,000.00	15%	400	12
12	Indomaret	Ahmad Ruslianto Wibowo	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	200,000,000.00	500,000,000.00	6,000,000.00	11%	150	8
13	Indomaret	Salim Grup	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	500,000,000.00	350,000,000.00	20,000,000.00	25%	250	14
14	Indomaret	Ahmad Ruslianto Wibowo	ADA/T DP&SIUP	Cukup Strategis	500,000,000.00	350,000,000.00	15,000,000.00	20%	250	9
15	Indomaret	Salim Jonathan	ADA/T DP&SIUP	SangatS strategis	350,000,000.00	500,000,000.00	10,000,000.00	20%	300	9

1. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Tradisional

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	2	8	4	1
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	10	3	2
3	Keteraturan	0	2	8	5	0
4	Kemudahan Akses	0	0	4	10	1
5	Ketersediaan Fasilitas	0	2	10	2	1
6	Kebiasaan Berbelanja	0	1	5	7	2
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	6	8	1

2. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Modern

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	0	0	10	4
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	0	9	5
3	Keteraturan	0	0	1	9	4
4	Kemudahan Akses	0	0	0	10	4
5	Ketersediaan Fasilitas	0	0	0	11	3
6	Kebiasaan Berbelanja	0	1	1	8	4
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	0	11	3



5.4. ANALISIS DATA PENELITIAN

ANALISIS DATA PENELITIAN

KAJIAN KEBERADAAN PASAR LOKAL DI TENGAH PERTUMBUHAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI BANJARBARU

BERDASARKAN PADA KETERBATASAN INPUT DATA YANG ADA

1. YANG DAPAT DI ANALISIS HANYA PERSEPSI MASYARAKAT ATAS BEBERAPA INDIKATOR PADA PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL

a. PERSEPSI MASYARAKAT ATAS KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI TINJAU DARI HARAPAN DAN KINERJA

OUTPUT HASIL ANALISIS PADA 40 RESPONDEN ADALAH
I) PERSEPSI HARAPAN ATAS INDIKATOR-INDIKATOR PASAR MODERN DAN TRADISIONAL

Crosstabs

Pasar * Kebersihan

Crosstab

Count

		Kebersihan				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	2	13	19	6	40
	Pasar Modern	0	2	25	13	40
Total		2	15	44	19	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.464 ^a	3	.004
Likelihood Ratio	15.248	3	.002
Linear-by-Linear Association	11.380	1	.001

N of Valid Cases	80	
------------------	----	--

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

Pasar * Kenyamanan Berbelanja

Crosstab

Count

		Kenyamanan Berbelanja				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	2	12	20	6	40
	Pasar Modern	0	1	26	13	40
Total		2	13	46	19	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.669 ^a	3	.002
Likelihood Ratio	17.169	3	.001
Linear-by-Linear Association	11.964	1	.001
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

Pasar * Keteraturan

Crosstab

Count

		Keteraturan				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	3	14	17	6	40
	Pasar Modern	0	2	27	11	40

Crosstab

Count

		Keteraturan				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	3	14	17	6	40
	Pasar Modern	0	2	27	11	40
Total		3	16	44	17	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.743 ^a	3	.001
Likelihood Ratio	18.068	3	.000
Linear-by-Linear Association	11.690	1	.001
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.50.

Pasar * Kemudahan Akses

Crosstab

Count

		Kemudahan Akses				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	1	9	20	10	40
	Pasar Modern	0	1	26	13	40
Total		1	10	46	23	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.574 ^a	3	.036
Likelihood Ratio	9.925	3	.019
Linear-by-Linear Association	4.703	1	.030

N of Valid Cases	80	
------------------	----	--

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

Pasar * Ketersediaan Fasilitas

Crosstab

Count

		Ketersediaan Fasilitas				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	2	12	20	6	40
	Pasar Modern	0	3	26	11	40
Total		2	15	46	17	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.653 ^a	3	.022
Likelihood Ratio	10.832	3	.013
Linear-by-Linear Association	8.009	1	.005
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

Pasar * Kebiasaan Berbelanja

Crosstab

Count

		Kebiasaan Berbelanja				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	1	13	20	6	40
	Pasar Modern	0	4	29	7	40
Total		1	17	49	13	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square	7.495 ^a	3	.058
Likelihood Ratio	8.143	3	.043
Linear-by-Linear Association	4.238	1	.040
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

Pasar * Kualitas Barang Belanja

Crosstab

Count

		Kualitas Barang Belanja			Total
		Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	11	19	10	40
	Pasar Modern	0	27	13	40
Total		11	46	23	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.783 ^a	2	.002
Likelihood Ratio	17.040	2	.000
Linear-by-Linear Association	6.011	1	.014
N of Valid Cases	80		

A. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50.

Kesimpulan atas perbedaan harapan pada pasar tradisional dan pasar modern adalah bahwa pada semua indikator (7 indikator) responden memiliki perbedaan harapan hampir pada semua indikator (di tunjukan dengan nilai sig. Dari chi square < 5%) kecuali pada persepsi *kebiasaan berbelanja*.

Responden cenderung memandang memiliki persepsi atas harapan mereka bahwa kebersihan, kenyamanan berbelanja, keteraturan, kemudahan akses, ketersediaan fasilitas, kualitas barang belanja pada pasar moderen mendapat persepsi yang lebih baik di dibandingkan dengan pasar

tradisional namun untuk kebiasaan berbelanja responden memiliki persepsi yang sama baik pada pasar modern maupun pasar tradisional.

Dengan kata lain sebenarnya responden menanggapi kebiasaan yang sama (memiliki persepsi yang sama) baik pada pasar modern maupun pasar tradisional atas kebiasaan belanja mereka. Responden memiliki pilihan yang sama pada pasar modern dan pasar tradisional.

II) PERSEPSI KINERJA ATAS INDIKATOR-INDIKATOR PASAR MODERN DAN TRADISIONAL

Crosstabs

Pasar * Kebersihan

Crosstab

Count

		Kebersihan				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	3	18	19	0	40
	Pasar Modern	0	2	32	6	40
Total		3	20	51	6	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	25.114 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	30.550	3	.000
Linear-by-Linear Association	23.461	1	.000
N of Valid Cases	80		

A. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.50.

Pasar * Kenyamanan Berbelanja

Crosstab

Count

	Kenyamanan Berbelanja	Total

		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	5	14	20	1	40
	Pasar Modern	0	4	30	6	40
Total		5	18	50	7	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.127 ^a	3	.001
Likelihood Ratio	18.791	3	.000
Linear-by-Linear Association	15.630	1	.000
N of Valid Cases	80		

A. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.

Pasar * Keteraturan

Crosstab

Count

		Keteraturan				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	4	19	15	2	40
	Pasar Modern	0	6	27	7	40
Total		4	25	42	9	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.966 ^a	3	.001
Likelihood Ratio	19.067	3	.000
Linear-by-Linear Association	15.597	1	.000
N of Valid Cases	80		

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.966 ^a	3	.001
Likelihood Ratio	19.067	3	.000
Linear-by-Linear Association	15.597	1	.000
N of Valid Cases	80		

A. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

Pasar * Kemudahan Akses

Crosstab

Count

		Kemudahan Akses				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	2	13	21	4	40
	Pasar Modern	0	7	23	10	40
Total		2	20	44	14	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.462 ^a	3	.091
Likelihood Ratio	7.348	3	.062
Linear-by-Linear Association	6.204	1	.013
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

sar * Ketersediaan Fasilitas

Crosstab

Count

		Ketersediaan Fasilitas				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	3	16	21	0	40
	Pasar Modern	0	8	27	5	40
Total		3	24	48	5	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.417 ^a	3	.010
Likelihood Ratio	14.561	3	.002
Linear-by-Linear Association	10.742	1	.001
N of Valid Cases	80		

A. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.50.

Pasar * Kebiasaan Berbelanja

Crosstab

Count

		Kebiasaan Berbelanja			Total
		Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	14	25	1	40
	Pasar Modern	8	28	4	40
Total		22	53	5	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.606 ^a	2	.165
Likelihood Ratio	3.755	2	.153
Linear-by-Linear Association	3.420	1	.064
N of Valid Cases	80		

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.606 ^a	2	.165
Likelihood Ratio	3.755	2	.153
Linear-by-Linear Association	3.420	1	.064
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.

Pasar * Kualitas Barang Belanja

Crosstab

Count

		Kualitas Barang Belanja				Total
		Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik	
Pasar	Pasar Tradisional	1	15	23	1	40
	Pasar Modern	0	2	29	9	40
Total		1	17	52	10	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.033 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	20.693	3	.000
Linear-by-Linear Association	17.420	1	.000
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

Kesimpulan atas perbedaan persepsi kinerja pada pasar tradisional dan pasar modern adalah bahwa pada semua indikator (7 indikator) responden memiliki perbedaan harapan hampir pada semua indikator (di tunjukan dengan nilai sig. Dari chi square < 5%) kecuali pada persepsi *kemudahan akses dan kebiasaan berbelanja*.

Kota banjarbaru relatif baik infrastrukturnya dan wilayah yang menyatu tidak terpisah-pisah seperti kab/kota lain yang banyak terpisahkan sungai, sehingga keberadaan pasar modern dan pasar tradisional tidak berpengaruh pada keterjangkauan (akses) baik pasar modern maupun pasar tradisional mudah untuk di akses.

III) PENYERAPAN TENAGA KERJA

Jenis pasar * JUALAH TENAGA KERJA Crosstabulation

Count

		JUALAH TENAGA KERJA				Total
		1 s.d 3 orang	4 s.d 6 orang	7 s.d 10 orang	> 10 orang	
Jenis pasar	Toko Tradisional	37	3	0	0	40
	Toko Modern	2	11	20	7	40
Total		39	14	20	7	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	62.982 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	80.578	3	.000
Linear-by-Linear Association	54.235	1	.000
N of Valid Cases	80		

A. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.50.

Crosstab

Count

			JUALAH TENAGA KERJA				Total
			1 s.d 3 orang	4 s.d 6 orang	7 s.d 10 orang	> 10 orang	
Toko Tradisional	Jenis pasar	Toko Tradisional	37	3			40
	Total		37	3			40
Alfamart	Jenis pasar	Toko Modern	1	6	9	2	18
	Total		1	6	9	2	18

Indomart	Jenis pasar	Toko Modern			10	5	15
	Total				10	5	15
Toko Modern Lainya	Jenis pasar	Toko Modern	1	5	1		7
	Total		1	5	1		7
Total	Jenis pasar	Toko Tradisional	37	3	0	0	40
		Toko Modern	2	11	20	7	40
	Total		39	14	20	7	80

Chi-Square Tests

Jenis pasar		Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Toko Tadisional	Pearson Chi-Square	. ^a		
	N of Valid Cases	40		
Alfamart	Pearson Chi-Square	. ^a		
	N of Valid Cases	18		
Indomart	Pearson Chi-Square	. ^a		
	N of Valid Cases	15		
Toko Modern Lainya	Pearson Chi-Square	. ^a		
	N of Valid Cases	7		
Total	Pearson Chi-Square	62.982 ^b	3	.000
	Likelihood Ratio	80.578	3	.000
	Linear-by-Linear Association	54.235	1	.000
	N of Valid Cases	80		

A. No statistics are computed because Jenis pasar is a constant.

B. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.50.

Berdasarkan pada tabulasi silang (*crosstabulation*) dan hasil *pengujian chi-square* di atas (nilai *sig. Chi square* < 0.05). Terlihat bahwa pasar/toko/ritel modern menyerap tenaga kerja secara signifikan di dibandingkan dengan toko/pasar tradisional (hal positif penyerapan tenaga kerja adanya toko modern)

IV) PERBEDAAN PELANGGAN

Jenis pasar * JUMLAH PELANGGAN Crosstabulation

Count

		JUMLAH PELANGGAN					Total
		< = 10 Per hari	> 10 s.d 25 per hari	> 25 s.d 50 per hari	> 75 s.d 100 Per hari	> 100 per hari	
Jenis pasar	Toko Tradisional	4	13	17	5	1	40
	Toko Modern	0	1	7	0	32	40
Total		4	14	24	5	33	80

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	52.574 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	65.762	4	.000
Linear-by-Linear Association	41.509	1	.000
N of Valid Cases	80		

A. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00.

Dilihat dari jumlah pelanggan memang pelanggan beralih dari pasar tradisional ke toko modern. Perbedaan signifikan pelanggan toko tradisional dan toko modern

V. ANALISIS OMSET PENJUALAN

A. OMSET PENJUALAN DAN JUMLAH PELANGGAN

Pada pengujian normalitas di peroleh bahwa data sampel normal sehingga pengujian statistik menggunakan uji t berpasangan untuk mengetahui perubahan omset penjualan pada pasar tradisional

Pair 1	Omset Penjualan per hari Sbelum - Omset Penjualan per hari Sesudah	864375.0 0	996863.1 5	157617. 90	545562.7 0	1183187.30	5.484	39	.000
Pair 2	Jumlah Pelanggan per hari Sebelum - Jumlah Pelanggan per hari Sesudah	14.30000	9.57347	1.51370	11.23826	17.36174	9.447	39	.000

Hasil analisis menunjukkan adanya toko/ritel modern menurunkan rata-rata omset penjualan toko tradisional dari Rp. 1,965,000 menjadi Rp. 1,100,625. Perbedaan omset penjualan sebelum dan sesudah adanya pasar tradisional signifikan pada pengujian uji beda berpasangan sehingga hal ini mengindikasikan keberadaan pasar modern mengurangi pendapatan pada toko-toko tradisional. Secara rata-rata terjadi penurunan omset akibat adanya pasar/toko modern pada toko tradisional sebesar 38%.

Begitu pula untuk jumlah pelanggan terjadi penurunan secara signifikan. Dengan kata lain adanya toko modern pelanggan cenderung berpindah berbelanja dari toko/ritel tradisional ke toko/ritel modern.

B. KEUNTUNGAN USAHA

HASIL ANALISIS ADALAH SBB:

OUTPUTNYA:

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Keuntungan Sebelum (%)	10.00	40	4.385	.693
	Keuntungan Sesudah (%)	6.88	40	3.818	.604

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Keuntungan Sebelum (%) & Keuntungan Sesudah (%)	40	.766	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Keuntungan Sebelum (%) - Keuntungan Sesudah (%)	3.125	2.857	.452	2.211	4.039	6.917	39	.000

Hasil analisis keuntungan usaha pada toko tradisional atas keberadaan toko/ritel modern terjadi penurunan signifikan pada keuntungan yang diperoleh dengan adanya toko modern.

Rata-rata keuntungan toko tradisional sebelum ada pasar modern 10% dan setelah adanya pasar modern terjadi penurunan menjadi 6,88%.

5.5.PENGARUH PASAR MODERN TERHADAP OMZET PENJUALAN, KEUNTUNGAN USAHA, DAN JUMLAH PENJUALAN BARANG PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA BANJARBARU

1. Karakteristik Responden Toko/Kios Tradisional

NO	NAMA TOKO	NAMA PEMILIK USAHA	IJIN USAHA	TEMPAT USAHA	MODAL USAHA	INVESTASI AWAL	KEUNTUNGAN USAHA	JUMLAH PELANGGAN/HARI	JUMLAH TK/ORANG
1	TOKO Hj.Ipah	Ipah	ADA/TDP	Cukup Strategis	3,000,000.00	1,000,000.00		40	2
2	Kios Azizah	Hj. Martini	ADA/SIUP	Sangat Strategis	50,000,000.00	30,000,000.00	10%	150	3
3	Toko	Wanda	ADA	Cukup			30%	20	1

	Wanda			Strategi s	1,500,000.00	1,000,000.00			
4	Toko Riana	Zarkiyah	ADA/SI UP	Sangat Strategi s	5,000,000.00			40	1
5	Kios Zahra	Zahra	ADA	Cukup Strategi s	2,000,000.00	1,000,000.00	15%	15	1
6	Toko Dewi	Ody Sutrisno	ADA/SI UP	Cukup Strategi s	10,000,000.00	5,000,000.00	10%	50	2
7	Warung Puput	Puput	ADA/SI UP	Cukup Strategi s	8,000,000.00	4,000,000.00			2
8	Toko Salsabila	Salsabila	ADA/SI UP	Sangat Strategi s	15,000,000.00	6,000,000.00		50	3
9	Kios M.Rizky Saputra	Rizky	Ada	Cukup Strategi s			10%	15	2
10	Toko Nindy	Nindy	Ada	Cukup Strategi s	12,000,000.00	5,000,000.00	10%	20	2
11	Toko Fitri	Basih	Tidak Ada	Cukup Strategi s	6,000,000.00	3,000,000.00	10%	30	2
12	Toko Aulia	H. Udin Wahid	Tidak Ada	Kurang Strategi s	10,000,000.00	4,000,000.00	5%	20	2
13	Toko Wibowo	Pintarti	Tidak Ada	Cukup Strategi s	2,000,000.00	1,000,000.00	50%	30	2
14	Toko Misbah	Hj. Miskah	Tidak Ada	Cukup Strategi s	20,000,000.00	10,000,000.00	10%	100	2
15	Toko Ufi	Noormakia	Tidak Ada	Cukup Strategi s	2,000,000.00	1,000,000.00	10%	10	1
16	Toko Maria	Hj. Siti Maria Ulfah	ADA/P EMDA	Cukup Strategi s	20,000,000.00	15,000,000.00	10%	10	3
17	TK.Semba ko Ratu Elok	Saipul	Masih Proses	Cukup Strategi s	30,000,000.00	10,000,000.00	10%	50	1
18	Toko annisa	Sugiarti	Ada	Cukup Strategi s			5%	50	2
19	Toko DD	Muhammad Hayun	ADA/SI UP	Cukup Strategi s	150,000,000.00	50,000,000.00	6%	100	4
20	TK.Evie Widya	Mustafa	Tidak Ada	Sangat Strategi s	50,000,000.00	200,000,000.00	10%	100	3
21	Kios Wahyuni	Wahyuni	ADA/SI UP	Sangat Strategi s	15,000,000.00	10,000,000.00	10%	20	1
22	Kios Udin	Saifuddin	ADA/SI UP	Cukup Strategi s	20,000,000.00	35,000,000.00	10%	30	1
23	Perdana	Ella	ADA/SI UP	Cukup Strategi s	25,000,000.00	50,000,000.00	20%	30	2
24	Toko Ani	Ani	ADA/SI UP	Kurang Strategi s	25,000,000.00	40,000,000.00	10%	25	2

25	Barokah	DR. Nursahadah	ADA/P EMDA	Sangat Strategis	15,000,000.00	11,000,000.00	10%	10	1
26	Hj.Arbainah	Hj.Arbainah	ADA/K etua RT	Cukup Strategis	6,000,000.00	8,000,000.00	5%	15	2
27	V Toko	Lumi	Tidak Ada	Cukup Strategis	5,000,000.00	5,000,000.00	5%	20	2
28	kios Nadia	Nadia	Tidak Ada	Cukup Strategis	5,000,000.00	5,000,000.00	5%	20	2
29	Toko Sembako	Usman	Tidak Ada	Cukup Strategis	10,000,000.00	8,000,000.00	5%	30	1
30	Toko Yasmin	Faisal	ADA/SI UP	Cukup Strategis	10,000,000.00	10,000,000.00	10%	30	2
31	Kios Nursyifa	Ahmad Busairi	ADA/SI UP	Cukup Strategis	10,000,000.00	5,000,000.00	10%	15	1
32	Toko Sembako Aulia	Abdul Sukimo	ADA/SI UP	Cukup Strategis	15,000,000.00	15,000,000.00	10%	30	2
33	Toko Faiz	Muhammad Ansyari	Tidak Ada	Cukup Strategis	100,000,000.00	25,000,000.00	25%	100	5
34	Wahyu	Ilham Fauzi	ADA/SI UP	Sangat Strategis	5,000,000.00	3,000,000.00	10%	30	2
35	Warung Wibowo	Bintati	Tidak Ada	Sangat Strategis	10,000,000.00	5,000,000.00	20%	13	1
36	Mama Dani	H. Maysarah	ADA/SI UP	Cukup Strategis	5,000,000.00	5,000,000.00	10%	50	1
37	Toko Endah	Endah	ADA/S KU	Cukup Strategis	50,000,000.00	50,000,000.00	5%	50	4
38	Toko Aslika	Aslika	ADA/SI UP	Cukup Strategis	10,000,000.00	10,000,000.00	5%	50	2
39	Toko Kiki	H. Darmansyah	ADA/SI UP	Cukup Strategis	50,000,000.00	25,000,000.00	15%	80	3
40	Toko Fadhil	Suyani	ADA/SI UP	Cukup Strategis	2,000,000.00	5,000,000.00	5%	10	1

2. Dampak Pasar Modern

NO	NAMA TOKO	Omset Penjualan (Rp./Perhari)		Jumlah Pelanggan (Orang/Perhari)		Harga Jual (%)		Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	
		Sebelum Ada Pasar Modern	Sesudah Ada Pasar Modern	Sebelum Ada Pasar Modern	Sesudah Ada Pasar Modern	Sebelum Ada Pasar Modern	Sesudah Ada	Sebelum Ada	Sesudah Ada
1	TOKO Hj.Ipah	500,000.00	300,000.00	75	50	Tetap 10%	Tetap 10%	2	2
2	Kios Azizah	500,000.00	300,000.00	50	30	Naik 30%	Tetap 20%	3	3
3	Toko			30	20	Naik 15%	Tetap	1	1

	Wanda	1,500,000.00	1,000,000.00				5%		
4	Toko Riana	750,000.00	500,000.00	35	25	Naik 10%	Tetap 5%	1	1
5	Kios Zahra	250,000.00	150,000.00	40	20	Naik 10%	Tetap 10%	1	1
6	Toko Dewi	2,500,000.00	1,000,000.00	50	35	Naik 10%	Tetap 7%	2	2
7	Warung Puput	500,000.00	400,000.00	40	30	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
8	Toko Salsabila	3,000,000.00	2,000,000.00	50	35	Naik 10%	Tetap 7%	3	3
9	Kios M.Rizky Saputra	2,500,000.00	1,000,000.00	40	30	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
10	Toko Nindy	6,000,000.00	2,000,000.00	75	30	Naik 20%	Tetap 20%	2	2
11	Toko Fitri	50,000.00	35,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
12	Toko Aulia	500,000.00	400,000.00	25	15	Naik 5%	Tetap 5%	2	2
13	Toko Wibowo	50,000.00	30,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
14	Toko Misbah	3,000,000.00	2,500,000.00	100	75	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
15	Toko Ufi	500,000.00	300,000.00	15	10	Naik 5%	Tetap 5%	1	1
16	Toko Maria	2,000,000.00	1,000,000.00	15	10	Naik 10%	Tetap 5%	3	3
17	TK.Sembako Ratu Elok	3,000,000.00	1,500,000.00	50	35	Naik 10%	Tetap 5%	1	1
18	Toko annisa	5,000,000.00	2,000,000.00	50	20	Naik 10%	Tetap 10%	2	2
19	Toko DD	6,000,000.00	3,000,000.00	100	60	Naik 10%	Tetap 6%	4	4
20	TK.Evie Widya	3,000,000.00	1,500,000.00	50	35	Naik 10%	Tetap 5%	3	3
21	Kios Wahyuni	800,000.00	500,000.00	20	15	Naik 10%	Tetap 5%	1	1
22	Kios Udin	800,000.00	500,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	1	1
23	Perdana	1,000,000.00	400,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
24	Toko Ani	1,500,000.00	1,000,000.00	25	15	Naik 5%	Tetap 5%	2	2
25	Barokah	6,000,000.00	3,000,000.00	15	10	Naik 5%	Tetap 5%	1	1
26	Hj.Arbaiah	50,000.00	35,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
27	V Toko	3,000,000.00	2,000,000.00	20	15	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
28	kios Nadia	100,000.00	75,000.00	50	35	Naik 5%	Tetap 5%	2	2
29	Toko Sembako	300,000.00	200,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	1	1
30	Toko Yasmin	250,000.00	200,000.00	50	35	Naik 5%	Tetap 5%	2	2
31	Kios Nursyifa	200,000.00	200,000.00	15	10	Naik 5%	Tetap 5%	1	1
32	Toko Sembako Aulia	3,000,000.00	1,500,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
33	Toko Faiz	4,000,000.00	3,500,000.00	100	75	Naik 10%	Tetap 10%	5	5

34	Wahyu	1,000,000.00	500,000.00	30	20	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
35	Warung Wibowo	500,000.00	250,000.00	15	13	Naik 5%	Tetap 5%	1	1
36	Mama Dani	3,000,000.00	2,000,000.00	80	60	Naik 10%	Tetap 10%	1	1
37	Toko Endah	4,000,000.00	2,000,000.00	50	35	Naik 10%	Tetap 5%	4	4
38	Toko Aslika	3,000,000.00	2,500,000.00	50	30	Naik 10%	Tetap 5%	2	2
39	Toko Kiki	4,000,000.00	2,000,000.00	100	75	Naik 15%	Tetap 15%	3	3
40	Toko Fadhil	1,000,000.00	750,000.00	30	30	Naik 10%	Tetap 10%	1	1

Harapan

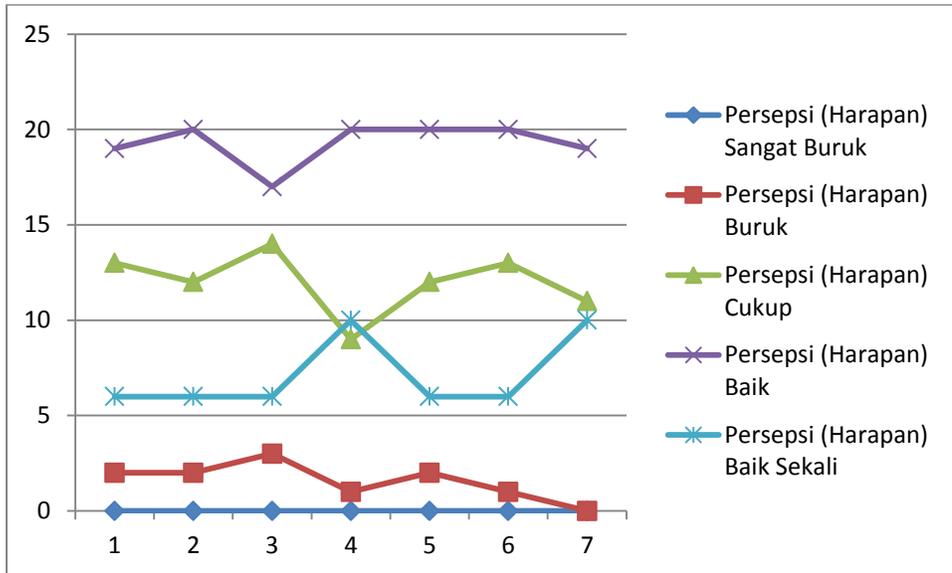
1. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Tradisional (Harapan)

No.	Indikator	Persepsi (Harapan)				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	2	13	19	6
2	Kenyamanan Berbelanja	0	2	12	20	6
3	Keteraturan	0	3	14	17	6
4	Kemudahan Akses	0	1	9	20	10
5	Ketersediaan Fasilitas	0	2	12	20	6
6	Kebiasaan Berbelanja	0	1	13	20	6
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	11	19	10

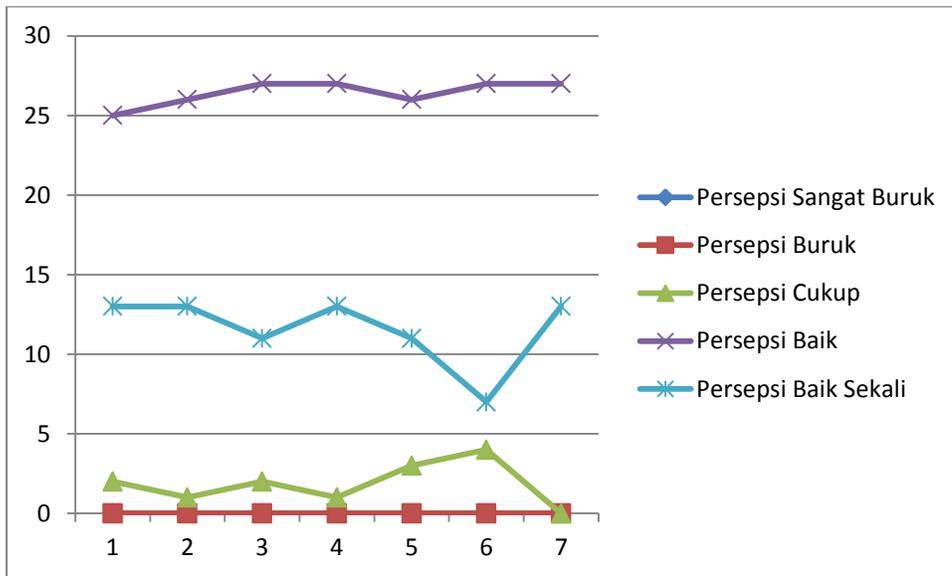
2. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Modern (Harapan)

No.	Indikator	Persepsi				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	0	2	25	13
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	1	26	13
3	Keteraturan	0	0	2	27	11
4	Kemudahan Akses	0	0	1	27	13
5	Ketersediaan Fasilitas	0	0	3	26	11
6	Kebiasaan Berbelanja	0	0	4	27	7
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	0	27	13

Persepsi Pasar Tradisional



Persepsi Pasar Modern



Kinerja

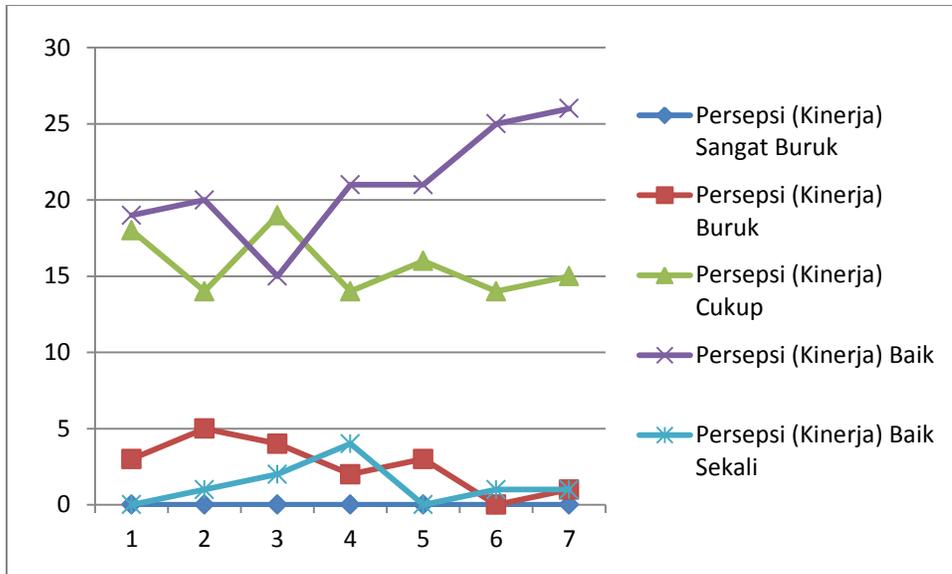
1. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Tradisional(Kinerja)

No.	Indikator	Persepsi (Kinerja)				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	3	18	19	0
2	Kenyamanan Berbelanja	0	5	14	20	1
3	Keteraturan	0	4	19	15	2
4	Kemudahan Akses	0	2	14	21	4
5	Ketersediaan Fasilitas	0	3	16	21	0
6	Kebiasaan Berbelanja	0	0	14	25	1
7	Kualitas Barang Belanja	0	1	15	26	1

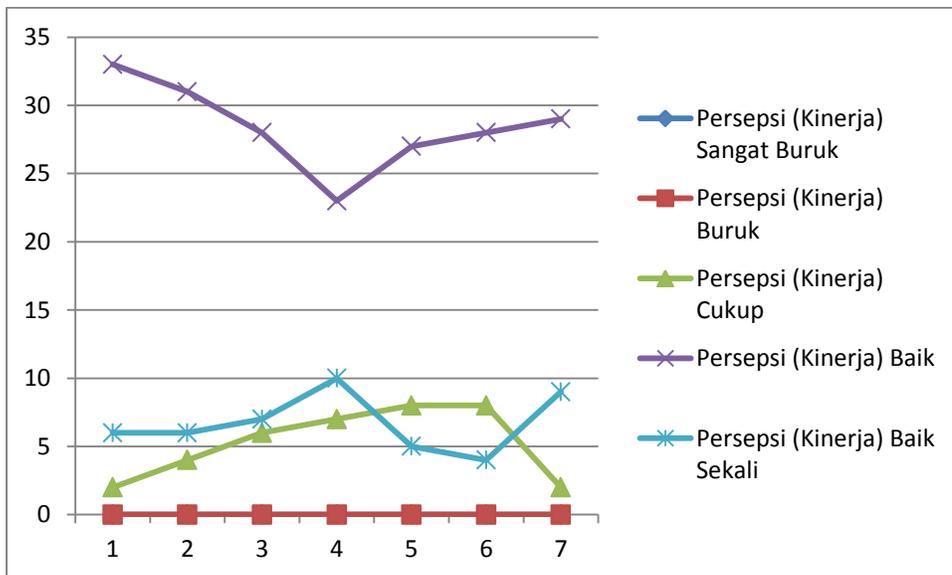
2. Persepsi Masyarakat Tentang Pasar Modern (Kinerja)

No.	Indikator	Persepsi (Kinerja)				
		Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Baik Sekali
1	Kebersihan	0	0	2	33	6
2	Kenyamanan Berbelanja	0	0	4	31	6
3	Keteraturan	0	0	6	28	7
4	Kemudahan Akses	0	0	7	23	10
5	Ketersediaan Fasilitas	0	0	8	27	5
6	Kebiasaan Berbelanja	0	0	8	28	4
7	Kualitas Barang Belanja	0	0	2	29	9

Persepsi Pasar Tradisional



Persepsi Pasar Modern



Hasil penelitian memberikan kesimpulan atas perbedaan harapan pada pasar tradisional dan pasar modern adalah bahwa pada semua indikator (7 indikator) responden memiliki perbedaan harapan hampir pada semua indikator (ditunjukkan dengan nilai sig. Dari chi square < 5%) kecuali pada persepsi *kebiasaan berbelanja*.

Responden cenderung memandang memiliki persepsi atas harapan mereka bahwa kebersihan, kenyamanan berbelanja, keteraturan, kemudahan akses, ketersediaan fasilitas, kualitas barang belanja pada pasar moderen mendapat persepsi yang lebih baik di bandingkan dengan pasar tradisional namun untuk kebiasaan berbelanja responden memiliki persepsi yang sama baik pada pasar modern maupun pasar tradisional.

Dengan kata lain sebenarnya responden menanggapi kebiasaan yang sama (memiliki persepsi yang sama) baik pada pasar modern maupun pasar tradisional atas kebiasaan belanja mereka. Responden memiliki pilihan yang sama pada pasar modern dan pasar tradisional.

a. Persepsi kinerja

Kesimpulan atas perbedaan persepsi kinerja pada pasar tradisional dan pasar modern adalah bahwa pada semua indikator (7 indikator) responden memiliki perbedaan harapan hampir pada semua indikator (di tunjukan dengan nilai sig. Dari chi square $< 5\%$) kecuali pada persepsi *kemudahan akses dan kebiasaan berbelanja*.

Kota banjarbaru relatif baik infrastruktur dan wilayah yang menyatu tidak terpisah-pisah seperti kab/kota lain yang banyak terpisahkan sungai, sehingga keberadaan pasar modern dan pasar tradisional tidak berpengaruh pada keterjangkauan (akses) baik pasar modern maupun pasar tradisional mudah untuk di akses.

b. Penyerapan tenaga kerja

Berdasarkan pada tabulasi silang (*crosstabulation*) dan hasil *pengujian chi-square* di atas (nilai sig. *Chi square* < 0.05). Terlihat bahwa pasar/toko/ritel modern menyerap tenaga kerja secara signifikan di bandingkan dengan toko/pasar tradisional (hal positif penyerapan tenaga kerja adanya toko modern)

c. Pelanggan

Dilihat dari jumlah pelanggan memang pelanggan beralih dari pasar tradisional ke toko modern. Perbedaan signifikan pelanggan toko tradisional dan toko modern

d. Jumlah pelanggan

Dilihat dari jumlah pelanggan memang pelanggan beralih dari pasar tradisional ke toko modern. Perbedaan signifikan pelanggan toko tradisional dan toko modern analisis omset penjualan. Pada pengujian normalitas di peroleh bahwa data sampel normal sehingga pengujian statistik menggunakan uji t berpasangan untuk mengetahui perubahan omset penjualan pada pasar tradisional

e. Hasil Analisis Pengaruh Ritel Modern Terhadap Omzet dan Pelanggan

Hasil analisis menunjukkan adanya toko/ritel modern menurunkan rata-rata omzet penjualan toko tradisional dari Rp. 1,965,000 menjadi Rp. 1,100,625. Perbedaan omzet penjualan sebelum dan sesudah adanya pasar tradisional signifikan pada pengujian uji beda berpasangan sehingga hal ini mengindikasikan keberadaan pasar modern mengurangi pendapatan pada toko-toko tradisional. Secara rata-rata terjadi penurunan omzet akibat adanya pasar/toko modern pada toko tradisional sebesar 38%. Begitu pula untuk jumlah pelanggan terjadi penurunan secara signifikan. Dengan kata lain adanya toko modern pelanggan cenderung berpindah berbelanja dari toko/ritel tradisional ke toko/ritel modern.

f. Keuntungan usaha

Hasil analisis keuntungan usaha pada toko tradisional atas keberadaan toko/ritel modern terjadi penurunan signifikan pada keuntungan yang diperoleh dengan adanya toko modern. Rata-rata keuntungan toko tradisional sebelum ada pasar modern 10% dan setelah adanya pasar modern terjadi penurunan menjadi 6,88%.

Pasar adalah sebagai tempat terjadinya jual beli barang bagi masyarakat merupakan salah satu cerminan perekonomian dan sosial budaya setiap komunitas di dunia ini. Pasar mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dari yang bersifat tradisional menjadi modern. Perkembangan ini terjadi di kota-kota dunia. Keberadaan pasar modern dewasa ini tidak dapat dibendung seiring dengan perubahan pemikiran dan perilaku konsumsi masyarakat. Namun keberadaannya dikuatirkan dapat mempengaruhi peran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat. Kendatipun keberadaan pasar tradisional tidak dapat dikesampingkan dalam menopang perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Namun ternyata keberadaan pasar modern mempengaruhi pendapatan pedagang pasar tradisional. Setelah adanya pasar modern, pendapatan pedagang jadi berkurang/menurun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk menata pengelolaan perpasaran, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen lebih besar agar dapat dilaksanakan secara konsisten;
- b. Secara makro, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pasar modern telah mengancam eksistensi pasar tradisional. Fakta iniantara lain diungkap dalam penelitian ac nielson yang menyatakan bahwa pasar modern telah tumbuh sebesar 31,4% sedangkan dalam penelitian ini mencapai 38%. Bersamaan dengan itu, pasar tradisional telah tumbuh secara negatif sebesar 8% dalam penelitian ini tumbuh negatif mencapai 10%.
- c. Berdasarkan kenyataan ini maka pasar tradisional akan habis dalam kurun waktu sekitar 12 – 15 tahun yang akan datang, sehingga perlu adanya langkah preventif untuk menjaga kelangsungan pasar tradisional termasuk kelangsungan usahaperdagangan (ritel) yang dikelola oleh Koperasi dan UKM
- d. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dampak keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional adalah dalam hal penurunan omzet penjualan. Dengan menggunakan uji beda pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, hasil analisis menunjukkan bahwa dari 3 variabel yang diteliti, variabel omzet penjualan pasar tradisional menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah hadirnya pasar modern dimana omzet seelah ada pasar modern lebih rendah dibandingkan sebelum hadirnya pasar modern. Variabel lainnya, yaitu jumlah tenaga kerja dan harga jual barang juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.
- e. Berdasarkan hasil analisis terhadap perilaku konsumen, diperoleh hasil persepsi masyarakat memiliki perlakuan yang sama terhadap pasar modern dan pasar tradisional

6.2. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

- Untuk mempertahankan keberadaan pasar-pasar tradisional beberapa solusi alternatif yang ditawarkan adalah melakukan pembenahan kualitas pasar-pasar tradisional,
- Terutama yang menyangkut kebersihan, keteraturan, serta kenyamanan sehingga dapat memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari.
- Disamping itu, perlu ditegakkan peraturan yang mengatur jarak antara pembangunan pasar modern dengan pasar-pasar tradisional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional yang pada gilirannya dapat membantu peran pasar tradisioanal dalam perekonomian suatu wilayah.